



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DAN**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH**

**TAHUN 2024**

**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA DAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
S U M B E R 45611

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**TAHUN 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.  
NIP : 19680124 199203 2 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Cirebon

Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber, 02 Januari 2025

Kepala DPPKBP3A

Kab. Cirebon,

**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

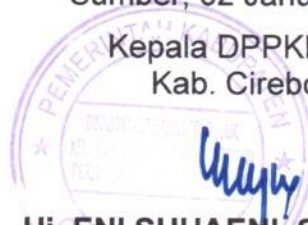
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia- Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan media informasi sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas serta sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak formal maupun non formal.

Sumber, 02 Januari 2025

Kepala DPPKBP3A  
Kab. Cirebon,



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Penjelasan Umum .....	1
(1) Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah .	1
(2) Rincian Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
(3) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi Pengawasan/ Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan .....	1
<b>II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	4
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	4
(1) Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	4
(2) Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	4
(3) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	4
2.2 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	4
(1) Capaian Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	4
(2) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja .	5
(3) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....	5
(4) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target RPJMD .....	6
(5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai .....	6
(6) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja ..	7
(7) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi Pengawasan/ Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan.....	14
2.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	29
2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	29
<b>III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b> .....	31
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diterima dan Dilaksanakan.....	32
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diterima dan Dilaksanakan .....	63
3.3 Permasalahan dan Kendala .....	64
3.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	64
<b>IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b> .....	65
4.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	65
4.2 Realisasi.....	65
4.3 Alokasi Anggaran .....	65
4.4 Dukungan Personil.....	65
4.5 Permasalahan dan Solusi .....	65
4.6 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	65
<b>V. PRESTASI-PRESTASI</b> .....	65
<b>VI. PENUTUP</b> .....	66
<b>VII. LAMPIRAN</b> .....	66

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Penjelasan Umum

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon.

### (1) Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berikut dasar hukum pembentukan perangkat daerah.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomer 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;</li><li>Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li></ul>

### (2) Rincian Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berikut rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83 Pegawai	6 Pegawai	14 Pegawai	103 pegawai

### (3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 48.945.166.954,- dengan realisasi sejumlah

Rp. 46.125.737.435,- atau 94,24%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.2.819.429.519,-.. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2024.

**Tabel. Pendapatan dan Belanja**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>					
5.	BELANJA DAERAH	48.945.166.954	46.125.737.435	2.819.429.519	<b>94,24</b>
5.1.	BELANJA OPERASI	46.206.559.954	44.853.130.435	1.353.429.519	<b>97,07</b>
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	19.022.365.000	18.585.690.941	436.674.059	97,70
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.874.194.954	25.957.439.494	916.755.460	96,59
5.1.05	BELANJA HIBAH	310.000.000	310.000.000	-	100,00
5.2	BELANJA MODAL	2.738.607.000	1.272.607.000	1.466.000.000	<b>46,47</b>
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.738.607.000	1.272.607.000	1.466.000.000	46,47
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>					
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(-48.945.166.954)</b>	<b>(-46.125.737.435)</b>	<b>(2.819.429.519)</b>	<b>(94,24)</b>

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut.

**Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi  
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun Anggaran 2024**

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	Ket
1	APBN					
1.1	DAK NON FISIK (BOKB)	21.054.543.254	20.389.586.824	664.956.430	96,84%	Dana Bantuan Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
	DAK Fisik	3.219.818.000	1.702.348.000	1.517.470.000	52,87%	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
1.2	DAK Non Fisik (BOPPA)	405.999.600	354.187.733	51.812.267	87,24%	Bantuan Operasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BOPPA)
2	APBD Provinsi	-	-	-	-	-

**(4) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan/  
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi Pengawasan/  
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.437.816.700	19.928.575.783	97,51 %
2	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	1.204.309.800	1.198.954.150	99,56 %
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12.935.965.754	11.387.115.400	88,03%
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	11.447.068.200	10.807.524.524	94,41 %
3	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.191.071.300	1.186.468.600	99,61 %
		Program Perlindungan Perempuan	331.519.500	326.923.345	98,61 %
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	405.871.100	404.960.300	99,78 %
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	166.997.900	113.062.700	67,70 %
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	487.566.900	486.984.800	99,88 %
		Program Perlindungan Khusus Anak	336.979.800	285.167.833	84,62 %

## II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### I.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

#### 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

nihil

#### 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau *Outcome* pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon urusan wajib dan pilihan terlampir.

No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja Outcome
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.12 Poin
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,6865%
2.m.3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6091%
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,1302%
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,6077

#### 3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Nihil

### 2.2 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### (1) Capaian Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	Prosen	47.32
1.1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera	Prosen	87.54

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		(KS1+KS2) (Non Kumulatif)		
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	Prosen	7.28
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	Prosen	0.33
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	Poin	2.20
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	poin	90

## (2) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1	Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	Prosen	47.32	0	100
1.1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2) (Non Kumulatif)	Prosen	87.54	0	0
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	Prosen	7.28	0	100
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	Prosen	0.33	0.34	103.03
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	Poin	2.20	2.19	0.45
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	poin	90	90	100

## (3) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		BERTAMBAH/BERKURANG
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	Prosen	0	0	-
1.1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2) (Non Kumulatif)	Prosen	82.00	0	-82.00
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	Prosen	18.00	0	-18.00

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		BERTAMBAH/BERKURANG
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	
		Kumulatif)				
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	Prosen	0.527	0.34	-
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	Poin	2.19	2.19	-
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	poin	89.010	90.00	0,99

#### (4) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target RPJMD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMD TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	Prosen	47.32	0	100
1.1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2) (Non Kumulatif)	Prosen	87.54	0	0
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	Prosen	7.28	0	100
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	Prosen	0.33	0.34	103.03
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	Poin	2.20	2.19	0.45
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	poin	90	90	100

#### (5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	100	94.24	5,76
1.1	Meningkatnya keluarga	Meningkatnya	-	-	-

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2) (Non Kumulatif)			
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	100	95.74	4,26%
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	103.03	94.19	8,84%
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	0.45	84.57	-84,12%
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	100	97.52	2,48%

Ket : Tingkat efisiensi : % Capaian Kinerja dikurangi % Penyerapan Anggaran

### (6) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
1	<b>Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan</b>					
1.1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2) (Non Kumulatif)	Prosen	87.54	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Program Pengendalian Penduduk</li> <li>➢ Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Sub Kegiatan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</li> <li>2.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</li> </ol> </li> <li>➢ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>➢ Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>➢ Sub Kegiatan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pengendalian Program KKBPK</li> <li>2.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana</li> <li>3.Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</li> <li>4.Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>5.Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> </ol> </li> <li>➢ Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas</li> </ul>
		Cakupan keluarga Pra KS (Non Kumulatif)	Prosen	7.28	0	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						<p>Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> </ul> </li> <li>➤ Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>2.Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>3.Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>4.Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>5.Peningkatan Kesertaan KB Pria</li> <li>6.Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</li> </ul> </li> <li>➤ Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</li> <li>2.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</li> </ul> </li> <li>➤ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> <li>➤ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</li> <li>2.Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</li> <li>3.Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</li> <li>4.Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga</li> </ul> </li> </ul>

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						<p>Akseptor (UPPKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</li> <li>2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</li> </ul> </li> </ul>
1.2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi (Non Kumulatif)	Prosen	0.33	0.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>➤ Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG</li> </ul> </li> <li>➤ Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</li> </ul> </li> <li>➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>➤ Program Perlindungan Perempuan</li> <li>➤ Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan</li> </ul> </li> </ul>

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						Kabupaten/Kota > Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota > Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota > Program Peningkatan Kualitas Keluarga > Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota > Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota > Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota > Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota > Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak > Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota > Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota > Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) > Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota > Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota > Program Perlindungan Khusus Anak > Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						<p>Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</li> <li>➢ Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana (Non Kumulatif)	Poin	2.20	2.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>➢ Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Program KKBPK</li> <li>2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana</li> <li>3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</li> <li>4. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</li> <li>5. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</li> <li>➢ Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</li> <li>➢ Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>8. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>9. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>10. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> <li>11. Peningkatan Kesertaan KB Pria</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						<p>12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>3.Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</li> <li>4.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</li> </ul> </li> </ul>
1.4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	poin	90	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>➢ Sub kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>6.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>➢ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> </ol> </li> <li>➢ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</li> </ol> </li> <li>➢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>➢ Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3.Penyediaan Barang</li> <li>4.Cetakan dan Penggandaan</li> <li>5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>6.Penyediaan Bahan/Material</li> <li>7.Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>8.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>9.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</li> </ol> </li> <li>➢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</li> </ul>

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
				TARGET	REALISASI	
						Pemerintah Daerah ➤ Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel ➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**(7) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi Pengawasan/ Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**

**Tabel. Pelaksanaan Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan), Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRDI
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON	1. Meningkatkan 8 (delapan) fungsi keluarga; 2. Mensinergikan program lintas sektoral; 3. Menghasilkan update data keluarga; 4. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang; 5. Tersusunnya buku kajian kependudukan; 6. Meningkatkan kegiatan KIE; 7. Meningkatkan peserta KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK  Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	tersediannya informasi data keluarga  Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga  Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Kumulatif)  Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Kumulatif)  1. Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status 2. Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan 3. Peningkatan jumlah akseptor MKJP 4. Peningkatan CU/PUS 5. Jumlah pendidik/Motivator sebaya	100 persen  12 Bulan  25 Laporan  276 Dokumen  10 Kampung KB 20.20 Tahun 25.40 Prosen 75.40 Prosen 340 Orang	1.204.309.800  1.204.309.800  1.045.609.800  158.700.000  12.935.965.754	100  12  23  276  24 21.40 93.21 210.905 60	100  100  92  100  240 105.94 366.97 279.71 164.71	1.198.954.150  1.198.954.150  1.040.254.150  158.700.000  11.387.115.400	99,56%  99,56%  99,49%  100,00%  88,03%	1. Data hasil Kegiatan Bangga Kencana belum maksimal terentry pada Aplikasi terentry pada <a href="https://siga.bkkbn.go.id">https://siga.bkkbn.go.id</a> untuk menghasilkan data yang valid sesuai waktu dan pelaksanaan dilapangan 2. KB MKJP Belum Tercapai 3. Masih banyak Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang masih Strata Dasar 4. KB Pasca Persalinan yang	1. Pembentukan Koordinator Operator SIGA UPTD P5A 2. Pembentukan Operator SIGA i Fasyankes untuk Pelayanan KB yang meliputi K/o, R1 dan R2 Yan KB 3. Pembinaan rutin dan Monev kepada: ➢ Kepala UPTD P5aA ➢ Koordinator Operator SIGA UPTD P5A ➢ Operator SIGA di Fasyankes, ➢ Linilapangan serta	1) Rekomendasi DPRD Tahun 2023 • Tingkatkan Cakupan dan Efektivitas Program Penyuluhan ke tingkat Komunitas Sekolah, dan tempat kerja. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, Guru, dan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			MKJP; 8. Meningkatkan peserta KB Pria; 9. Menekan Peserta KB Istimahat; 10. Meningkatkan Program PUP; 11. Menurunkan PUS <20 tahun; 12. Meningkatkan Program KB-KR. 13. Tumbuh kembang anak terpapar pada sasaran.	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan	2.216.798.054	40	100	2.210.297.400	99,71%	Menggunakan MKJP belum Tercapai	> Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) juga > TPK (Tim Pendamping Keluarga dalam proses entry nya agar entry data melalui SIGA dapat berjalan maksimal 4. Penguatan Lintas Sektor dan Penggerakan Lini Lapangan	kepada Masyarakat. <b>2) Tindak Lanjut</b> • Melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan sebaya di lapangan dan melakukan audensi dengan tokoh masyarakat, pengambil kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan hak reproduksi <b>3) Tujuan/Masalah yang Diselesaikan</b> a. Komunitas sekolah maupun tempat kerja memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan Hak Reproduksi yang benar dan dapat
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Kumulatif)	5 Laporan	80.400.000	5	100	80.400.000	100,00%			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kumulatif)	276 Laporan	920.000.654	276	100	920.000.000	100,00%			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Kumulatif)	410 Laporan	589.970.500	410	100	589.070.500	99,85%			
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Kumulatif)	13 Dokumen	95.684.800	72	553.85	95.684.800	100,00%			
				Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan	23 Organisasi	530.742.100	65	282.61	525.142.100	98,94%			

NO.	URUSAN PEMERINTAH AN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRDI
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Mitra Kerja (Kumulatif)									dipertanggungjawabkan.
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	3.300 Orang	1.272.000.000	3.472	105,21	1.272.000.000	100,00%		
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Kumulatif)	15264 Orang	1.272.000.000	3.472	22,75	1.272.000.000	100,00%		
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB Baru	87.100 orang	7.822.398.300	14.106	16,20	6.280.070.200	80,28%		
					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Kumulatif)	5 Laporan	77.128.000	5	100	68.728.000	89,11%		
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Kumulatif)	7300 Orang	6.319.284.600	14106	193,23	4.857.120.500	76,86%		
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Kumulatif)	5 Unit	1.237.818.000	33	660	1.166.600.000	94,25%		
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	2 Laporan	47.250.000	3	150	47.250.000	100,00%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jaringan dan Jejaringnya	Jejaringnya (Kumulatif)									
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Kumulatif)	100 Orang	58.723.700	130	130	58.723.700	100,00%			
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Kumulatif)	855 Orang	82.194.000	1824	213.33	81.648.000	99,34%			
				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan</b>	<b>10 Kampung KB</b>	<b>1.624.769.400</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1.624.747.800</b>	<b>100,00%</b>			
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Kumulatif)	1 Dokumen	12.000.000	2	200	12.000.000	100,00%			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kumulatif)	10 Kampung	1.612.769.400	10	100	1.612.747.800	100,00%			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB</b>	<b>57.88 Prosen</b>	<b>11.447.068.200</b>	<b>67.95</b>	<b>117.40</b>	<b>10.807.524.524</b>	<b>94,41%</b>			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.872 Anggota	428.368.200	72.872	100	363.018.200	84,74%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				<b>Kesejahteraan Keluarga</b>										
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Kumulatif)	1 Laporan / Dokumen	7.150.000	1	100	7.150.000	100,00%			
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Kumulatif)	2 Unit	300.000.000	2	100	234.650.000	78,22%			
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Kumulatif)	32 Laporan	47.010.500	32	100	47.010.500	100,00%			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kumulatif)	10 Kelompok	74.207.700	10	100	74.207.700	100,00%			
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	Cakupan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat	1 laporan	11.018.700.000	1	100	10.444.506.324	94,79%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	pendampingan									
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Kumulatif)	1 laporan	5.247.000.000	3	300	4.672.806.324	89,06%			
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (Kumulatif)	1 laporan	5.771.700.000	2	200	5.771.700.000	100,00%			
2	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan politik; 2. Peningkatan Pendapatan Perempuan; 3. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan; 2. Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian; 3. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan.	25 Prosen  12.30 Prosen  36.20 Prosen	1.191.071.300	30  -  40.04	120  -  110.61	1.186.468.600	99,61%	1. Sulitnya mendapatkan data yang sudah terpilah baik di tiap-tiap SKPD ataupun di Kecamatan. 2. banyak faktor yang menyebabkan perceraian serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Masih banyak perempuan dengan latar pendidikan dan tingkat	I. Memberikan Sosialisasi kepada petugas pendataan tentang tata cara pengisian formulir data terpilah. II. Memberikan Sosialisasi untuk menguatkan Ketahanan Keluarga bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. II. Memberikan Pembekalan	1) Rekomendasi DPRD Tahun 2023 b. Tingkatkan Kapasitas Staf DPPKBP3A dalam penanganan Kasus Kekerasan dan Perlindungan Anak melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis. Bentuk jaringan kerja sama dengan lembaga perlindungan
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	133 Orang	185.995.700	133	100	185.995.700	100,00%			
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan	133 Perangkat Daerah	185.995.700	133	100	185.995.700	100,00%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah; 4. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah; 5. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; 6. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah	Termasuk PPRG	Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)							ekonomi keluarga yang rendah 4. Banyak perempuan korban kekerasan yang tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan pengaduan atau merasa kesulitan menemukan informasi yang jelas mengenai saluran pengaduan yang tersedia	berupa pembejajaran dengan metode kelas/sekolah non formal dan pelatihan untuk ekonomi perempuan mandiri. 5. Mengembangkan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh semua perempuan, termasuk dengan menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, aplikasi mobile, atau website yang bisa diakses secara anonim.	anak, lembaga pemerintah terkait, dan organisasi Non-Profit untuk meningkatkan Respon terhadap kasus-kasus kekerasan dan Pelecehan Anak.  <b>2) Tindak Lanjut</b> a. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan ABH  b. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus  c. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus  d. Coaching Lanjutan bagi Tenaga Layanan
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	175 Orang	385.970.700	175	100	382.441.000	99,09%			
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	45 Dokumen	385.970.700	45	100	382.441.000	99,09%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang	619.104.900	160	100	618.031.900	99,83%			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Kumulatif)	10 Orang	10.000.000	10	100	10.000.000	100,00%			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Kumulatif)	300 Dokumen	609.104.900	300	100	608.031.900	99,82%			
				PROGRAM PERLINDUNGAN	Prosentase perempuan yang	1.41 Prosen	331.519.500	1.37	97.16	326.923.345	98,61%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			lainnya; 7. Efektivitas kelembagaan perlindungan anak; 8. peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 9. penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Dinas DPPKBP3A;	PEREMPUAN	mendapat perlindungan									Perlindungan Perempuan dan Anak  e. Gugus Tugas Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon  f. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)  g. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak  h. MOU dengan LBH Gumilang  i. MOU dengan RSUD Arjawinangun, RSUD Waled dan RSUP Sidawangi  j. MOU dengan WCC Mawar
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 2. Jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; 3. Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	245 Orang	137.757.700	245	100	137.754.600	100,00%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	1 Dokumen	137.757.700	1	100	137.754.600	100,00%			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	90 Persen	124.742.000	87	96,67	120.148.945	96,32%			
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Kumulatif)	90 Orang	124.742.000	87	96,67	120.148.945	96,32%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	112 Orang	69.019.800	112	100	69.019.800	100,00%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas									Balqis
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Non Kumulatif)	112 Orang	69.019.800	112	100	69.019.800	100,00%			k. MOU dengan LBH Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC)
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0.81 Prosen	405.871.100	0.70	86.42	404.960.300	99,78%			l. MOU dengan Biro Psikologi Ordinat MOU dengan KPI MOU dengan Kemenag
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan	100 Orang	259.646.700	100	100	259.382.300	99,90%			<b>3) Tujuan/ Masalah yang D diselesaikan</b>
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	100 Dokumen	259.646.700	100	100	259.382.300	99,90%			a. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran, Meningkatkan Koordinasi Antara Sektor, Pencegahan dan Penanganan Kasus secara Terpadu, Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Korban, Penyusunan Kebijakan dan Regulasi, Mendorong masyarakat untuk berperan
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	138 Orang	146.224.400	138	100	145.578.000	99,56%			
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan	146.224.400	138	100	145.578.000	99,56%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten/Kota	(Kumulatif)									
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Prosen	166.997.900	100	100	113.062.700	67,70%			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya buku data terpilah gender dan anak	120 Buku	166.997.900	120	100	113.062.700	67,70%			
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Kumulatif)	120 Dokumen	166.997.900	120	100	113.062.700	67,70%			
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2.40 Prosen	487.566.900	2.28	95	486.984.800	99,88%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang	487.566.900	1.425	100	486.984.800	99,88%			
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	50 Orang	51.914.100	55	110	51.892.500	99,96%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	1 Dokumen	431.619.800	1	100	431.059.300	99,87%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Kumulatif)	1 Dokumen	4.033.000	1	100	4.033.000	100,00%			Pencatatan Kasus yang Akurat dan Lengkap, Memahami Prosedur dan Standar Pelaporan Kasus yang Tepat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Kasus, Meningkatkan Kemampuan untuk Menggunakan Teknologi dalam Pencatatan dan Pelaporan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Memastikan Perlindungan Data dan Privasi, Meningkatkan Koordinasi Antara Lembaga
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Presentase anak yang mendapat perlindungan</b>	<b>2.40 Prosen</b>	<b>336.979.800</b>	<b>2.28</b>	<b>95</b>	<b>285.167.833</b>	<b>84,62%</b>			
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan</b>	<b>360 Orang</b>	<b>101.499.900</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>101.499.900</b>	<b>100,00%</b>			
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Non Kumulatif)	460 Orang	101.499.900	460	100	101.499.900	100,00%			
				<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan</b>		<b>235.479.900</b>			<b>183.667.933</b>	<b>78,00%</b>			
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Kumulatif)	100 Orang	235.479.900	97	97	183.667.933	78,00%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														melalui Pelaporan yang Terstandarisasi
3	Urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Prosen	20.437.816.700	98.90	98.90	19.928.575.783	97,51%	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	7	154.077.900	7	100	153.934.700	99,91%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	3 Dokumen	24.488.400	3	100	24.388.400	99,59%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kumulatif)	4 Laporan	15.924.000	4	100	15.924.000	100,00%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	1 Laporan	113.665.500	1	100	113.622.300	99,96%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	19.041.976.100	3	100	18.605.302.041	97,71%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif)	98 Orang/bulan	19.022.365.000	102	104.08	18.585.690.941	97,70%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.010.600	2	200	10.010.600	100,00%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(Kumulatif)									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kumulatif)	1 Laporan	9.600.500	2	200	9.600.500	100,00%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	34.000.000	1	100	34.000.000	100,00%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Kumulatif)	1 Dokumen	34.000.000	2	200	34.000.000	100,00%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7	557.168.600	7	100	536.793.800	96,34%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	1 Paket	9.066.000	2	200	9.066.000	100,00%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	1 Paket	113.807.000	4	400	113.807.000	100,00%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kumulatif)	1 Paket	27.543.900	3	300	25.211.100	91,53%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kumulatif)	9500 Dokumen	79.000.000	9500	100	79.000.000	100,00%			
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kumulatif)	1 Paket	155.124.600	2	200	151.174.600	97,45%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kumulatif)	1 Laporan	2.750.000	2	200	2.750.000	100,00%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kumulatif)	160 Laporan	60.120.300	160	100	60.112.400	99,99%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kumulatif)	3 Dokumen	109.756.800	4	133,33	95.672.700	87,17%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>13.670.000</b>	<b>4</b>	<b>66,67</b>	<b>13.670.000</b>	<b>100,00%</b>			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kumulatif)	4 Unit	13.670.000	4	100	13.670.000	100,00%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>301.142.400</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>271.657.315</b>	<b>90,21%</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kumulatif)	<b>36 Laporan</b>	124.783.500	36	100	95.723.215	76,71%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	<b>1 Laporan</b>	176.358.900	3	300	175.934.100	99,76%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan</b>	<b>268 unit</b>	<b>335.781.700</b>	<b>160</b>	<b>59,70</b>	<b>313.217.927</b>	<b>93,28%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kumulatif)	<b>4 Unit</b>	93.204.200	22	550	73.182.927	78,52%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDAS DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kumulatif)	156 Unit	29.177.500	145	92,95	28.069.400	96,20%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kumulatif)	17 Unit	213.400.000	17	100	211.965.600	99,33%			
<b>Jumlah</b>							<b>48.945.166.954</b>			<b>46.125.737.435</b>	<b>94,24%</b>			

### 2.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Nihil	Nihil	Nihil

### 2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
<b>1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1.2	Tingkatkan Cakupan dan Efektivitas Program Penyuluhan sampai ke tingkat Komunitas Sekolah, dan tempat kerja. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, Guru, dan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi kepada Masyarakat.	Melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan sebaya di lapangan dan melakukan audensi dengan tokoh masyarakat, pengambil kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan hak reproduksi	Komunitas sekolah maupun tempat kerja memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan Hak Reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan.
<b>2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.1	Tingkatkan Kapasitas Staf DPPKBP3A dalam penanganan Kasus Kekerasan dan Perlindungan Anak melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis. Bentuk jaringan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, lembaga pemerintah terkait, dan organisasi Non-Profit untuk meningkatkan Respon terhadap kasus-kasus kekerasan dan Pelecehan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan ABH</li> <li>2. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus</li> <li>3. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus</li> <li>4. Coaching Lanjutan bagi Tenaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>5. Gugus Tugas Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran, Meningkatkan Koordinasi Antara Sektor, Pencegahan dan Penanganan Kasus secara Terpadu, Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Korban, Penyusunan Kebijakan dan Regulasi, Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Meningkatkan Keterampilan Profesional dalam Menangani Kasus, Meningkatkan</li> </ol>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Kabupaten Cirebon 6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) 7. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak 8. MOU dengan LBH Gumilang 9. MOU dengan RSUD Arjawinangun, RSUD Waled dan RSUP Sidawangi 10. MOU dengan WCC Mawar Balqis 11. MOU dengan LBH Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) 11. MOU dengan Biro Psikologi Ordinat MOU dengan KPI MOU dengan Kemenag	Keterampilan Profesional dalam Menangani Kasus, Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor, Mengembangkan Sistem Manajemen Kasus yang Efektif, Pemberdayaan Peserta untuk Menangani Trauma Korban dengan Sensitivitas 3. Meningkatkan Keterampilan dalam Pencatatan Kasus yang Akurat dan Lengkap, Memahami Prosedur dan Standar Pelaporan Kasus yang Tepat, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Kasus, Meningkatkan Kemampuan untuk Menggunakan Teknologi dalam Pencatatan dan Pelaporan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Memastikan Perlindungan Data dan Privasi, Meningkatkan Koordinasi Antara Lembaga melalui Pelaporan yang Terstandarisasi

## **II. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon juga memperoleh Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memperoleh Anggaran Tugas Pembantuan dengan total anggaran sejumlah sejumlah Rp. 24.680.360.854,- dan realisasi sejumlah Rp. 22.446.122.557,- (90,95%). Kemudian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sejumlah Rp.0 dan realisasi Rp. 0 (0%).

### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diterima dan Dilaksanakan

**Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Keuangan	PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			64.015.200	64.015.200	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.015.200	64.015.200	100,00%			
			Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan BOKB serta penurunan stunting								
			Dukungan Manajemen	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	64.015.200	64.015.200	100	1 Laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Fasyankes yang teregister; 2. Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes yang update.								
			Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes	1. Waled 2. RSUD. Waled 3. Cibogo 4. Pasaleman 5. Ciledug 6. Pabuaran 7. Losari 8. Astanalanggar 9. Pabedilan 10. Kalimukti 11. Babakan 12. Gembongan 13. Gebang 14. Kalimaro 15. KarangSembung 16. Kubangdeleg 17. Sindanglaut 18. Susukan Lebak 19. Sedong 20. Astanajapura 21. RSU. Universitas Muhammadiyah Cirebon 22. Sidamulya 23. Pangenan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	84.000.000	84.000.000	100	1 Laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				24. Mundu 25. Pamengkang 26. Beber 27. Kamarang 28. Nanggela 29. Talun 30. Ciperna 31. Sumber 32. Sendang 33. Watubelah 34. Rs. Sumber Hurip 35. RS Paru Provinsi Jawa Barat Sumber Cirebon 36. Dukupuntang 37. Sindangjawa 38. Palimanan 39. Kepuh 40. RS Pasar Minggu Cirebon 41. RSU. Khalishah 42. Plumbon 43. Lurah 44. RS Mitra Plumbon 45. Waruroyom 46. Karang Sari 47. Plered 48. Pangkalan 49. Tengahtani 50. Kedawung 51. Rs. Permata 52. Gunungjati							

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				53. Mayung 54. Suranenggala 55. Kedaton 56. Klangeran 57. Bangodua 58. Jamblang 59. Tegalubug 60. RSUD Arjawinangun 61. Panguragan 62. Ciwaringin 63. Rs. Sumber Waras 64. Winong 65. Gempol 66. Susukan 67. Bunder 68. Gegesik 69. Jagapura 70. Kaliwedi								
			Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk perkembangan wilayah kerjanya									
			Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data di	424 Desa	40 UPTD P5A Kecamatan	254.400.000	254.400.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Wilayah kerja								BOKB
			data register pengendalian lapangan								
			Operasional Pengolahan Data	23 Balai Penyuluh KB : 1. Ciledug 2. Gunungjati 3. Palimanan 4. Plered 5. Sedong 6. Greged 7. Sumber 8. Beber 9. Talun 10. Plumbon 11. Arjawinangun 12. Dukupuntang 13. Pabuaran 14. Kedawung 15. Gegecik 16. Jamblang 17. Lemahabang 18. Waled 19. Losari 20. Babakan 21. Mundu 22. Tengahtani 23. Suranenggala	UPTD P5A Kecamatan	82.800.000	82.800.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket langganan broadband pada Balai Penyuluhan KB.	23 Balai Penyuluh KB : 1. Ciledug 2. Gunungjati 3. Palimanan 4. Plered 5. Sedong 6. Greged 7. Sumber 8. Beber 9. Talun	UPTD P5A Kecamatan	75.900.000	75.900.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				10. Plumbon 11. Arjawinangun 12. Dukupuntang 13. Pabuaran 14. Kedawung 15. Gegesik 16. Jamblang 17. Lemahabang 18. Waled 19. Losari 20. Babakan 21. Mundu 22. Tengahtani 23. Suranenggala							
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>9.167.578.054</b>	<b>9.142.165.300</b>	<b>99,72</b>			
			<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>1.975.960.454</b>	<b>1.974.359.800</b>	<b>99,92</b>			
			Laporan Audit Kasus Stunting per siklus (2 kali per tahun)								
			Audit kasus stunting	.OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	80.400.000	80.400.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini								

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana dan meningkatnya jumlah Keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana								
			Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	23 Balai Penyuluh KB : 1. Ciledug 2. Gunungjati 3. Palimanan 4. Plered 5. Sedong 6. Greged 7. Sumber 8. Beber 9. Talun 10. Plumbon 11. Arjawinangun 12. Dukupuntang 13. Pabuaran 14. Kedawung 15. Gegesik 16. Jamblang 17. Lemahabang 18. Waled 19. Losari 20. Babakan 21. Mundu 22. Tengahtani 23. Suranenggala	UPTD P5A Kecamatan	588.800.000	588.800.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dukungan Langganan Daya dan Jasa	23 Balai Penyuluh KB : 1. Ciledug 2. Gunungjati 3. Palimanan 4. Plered 5. Sedong 6. Greged 7. Sumber 8. Beber 9. Talun 10. Plumbon 11. Arjawinangun 12. Dukupuntang 13. Pabuaran 14. Kedawung 15. Gegecik 16. Jamblang 17. Lemahabang 18. Waled 19. Losari 20. Babakan 21. Mundu 22. Tengahtani 23. Suranenggala	UPTD P5A Kecamatan	82.800.654	82.800.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji	23 Balai Penyuluh KB : 1. Ciledug 2. Gunungjati 3. Palimanan 4. Plered 5. Sedong 6. Greged 7. Sumber 8. Beber 9. Talun 10. Plumbon 11. Arjawinangun	UPTD P5A Kecamatan	248.400.000	248.400.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				12. Dukupuntang 13. Pabuaran 14. Kedawung 15. Gegecik 16. Jamblang 17. Lemahabang 18. Waled 19. Losari 20. Babakan 21. Mundu 22. Tengahtani 23. Suranenggala							
			tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan stunting di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.								
			Mini Lokakarya Kecamatan	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak 9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu	UPTD P5A Kecamatan	560.000.000	560.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon 19. Weru 20. Kedawung 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Gegecik 29. Kaliwedi 30. Gebang 31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran 34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Greged 39. Suranenggala 40. Jamblang							
			Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan Stunting melalui media tradisional dan kearifan lokal di kabupaten dan kota.								
			Dukungan Media KIE Percepatan Penurunan Stunting	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	95.684.800	95.684.800	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon						BOKB
			laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting								
			koordinasi TPPS di Tingkat kabupaten/kota	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	319.875.000	318.275.000	99,50	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			<b>1.272.000.000</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>100</b>			
			Meningkatnya kesertaan ber-KB								
			Operasional Pelaksanaan KIE	424 Desa	UPTD P5A Kecamatan	1.272.000.000	1.272.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4.376.817.600</b>	<b>4.353.005.500</b>	<b>99,46</b>			
			Fasyankes yang kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsinya terpenuhi								
			Operasional Distribusi Alokon	1. Waled 2. RSUD. Waled	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	77.128.000	68.728.000	89,11%	1 laporan	100	DAK NON FISIK

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Cibogo 4. Pasaleman 5. Ciledug 6. Pabuaran 7. Losari 8. Astanalanggar 9. Pabedilan 10. Kalimukti 11. Babakan 12. Gembongan 13. Gebang 14. Kalimaro 15. Karangsembung 16. Kubangdeleg 17. Sindanglaut 18. Susukan Lebak 19. Sedong 20. Astanajapura 21. RSUD. Universitas Muhammadiyah Cirebon 22. Sidamulya 23. Pangenan 24. Mundu 25. Pamengkang 26. Beber 27. Kamarang 28. Nanggela 29. Talun 30. Ciperna 31. Sumber 32. Sendang 33. Watubelah 34. Rs. Sumber Hurip 35. RS Paru Provinsi Jawa Barat Sumber	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon						BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Cirebon 36. Dukupuntang 37. Sindangjawa 38. Palimanan 39. Kepuh 40. RS Pasar Minggu Cirebon 41. RSU. Khalishah 42. Plumbon 43. Lurah 44. RS Mitra Plumbon 45. Waruroyom 46. Karang Sari 47. Plered 48. Pangkalan 49. Tengahtani 50. Kedawung 51. Rs. Permata 52. Gunungjati 53. Mayung 54. Suranenggala 55. Kedaton 56. Klangeran 57. Bangodua 58. Jamblang 59. Tegalgubug 60. RSUD Arjawinangun 61. Panguragan 62. Ciwaringin 63. Rs. Sumber Waras 64. Winong 65. Gempol 66. Susukan 67. Bunder 68. Gegesik							

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				69. Jagapura 70. Kaliwedi							
			Peserta KB MKJP								
			Operasional Penggerakan Pelayanan IUD	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak 9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu 13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon 19. Weru 20. Kedawung 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Gegesik 29. Kaliwedi 30. Gebang 31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran	UPTD P5A Kecamatan	1.535.122.000	1.535.122.000	100	5.965 Akseptor	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Greged 39. Suranenggala 40. Jamblang							
			Operasional Pergerakan Pelayanan IMPLANT	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak 9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu 13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon 19. Weru 20. Kedawung 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Gegesik 29. Kaliwedi 30. Gebang	UPTD P5A Kecamatan	1.346.292.300	1.343.827.800	99,82	5.241 Akseptor	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran 34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Greged 39. Suranenggala 40. Jamblang							
			Operasional Pergerakan Pelayanan MOW	RSUD Ciwaringin dan RS Sumber Waras	UPTD P5A Kecamatan	1.318.980.200	1.306.827.600	99,08	452 Akseptor	100	DAK NON FISIK BOKB
			Operasional Pergerakan Pelayanan MOP	RSUD Ciwaringin dan RS Sumber Waras	UPTD P5A Kecamatan	6.969.100	6.969.100	100	5 Akseptor	100	DAK NON FISIK BOKB
			Operasional Pencabutan IMPLANT	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak 9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu 13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon 19. Weru	UPTD P5A Kecamatan	45.076.000	44.281.000	98,24	170 Akseptor	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				20. Kedawang 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Geesik 29. Kaliwedi 30. Gebang 31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran 34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Gregeed 39. Suranenggala 40. Jamblang							
			operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes								
			Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes	1. Waled 2. RSUD. Waled 3. Cibogo 4. Pasaleman 5. Ciledug 6. Pabuaran 7. Losari 8. Astanalanggar 9. Pabedilan 10. Kalimukti 11. Babakan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	38.250.000	38.250.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				12. Gembongan 13. Gebang 14. Kalimaro 15. KarangSembung 16. Kubangdeleg 17. Sindanglaut 18. Susukan Lebak 19. Sedong 20. Astanajapura 21. RSU. Universitas Muhammadiyah Cirebon 22. Sidamulya 23. Pangenan 24. Mundu 25. Pamengkang 26. Beber 27. Kamarang 28. Nanggela 29. Talun 30. Ciperna 31. Sumber 32. Sendang 33. Watubelah 34. Rs. Sumber Hurip 35. RS Paru Provinsi Jawa Barat Sumber Cirebon 36. Dukupuntang 37. Sindangjawa 38. Palimanan 39. Kepuh							

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				40. RS Pasar Minggu Cirebon 41. RSU. Khalishah 42. Plumbon 43. Lurah 44. RS Mitra Plumbon 45. Waruroyom 46. Karangsari 47. Plered 48. Pangkalan 49. Tengahtani 50. Kedawung 51. Rs. Permata 52. Gunungjati 53. Mayung 54. Suranenggala 55. Kedaton 56. Klangeran 57. Bangodua 58. Jamblang 59. Tegalgubug 60. RSUD Arjawinangun 61. Panguragan 62. Ciwaringin 63. Rs. Sumber Waras 64. Winong 65. Gempol 66. Susukan 67. Bunder 68. Gegesik 69. Jagapura							

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				70. Kaliwedi							
			Pertemuan koordinasi pelayanan KB, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya serta penguatan kelompok KB Pria								
			Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Fasyankes	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	9.000.000	9.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>1.542.800.000</b>	<b>1.542.800.000</b>	<b>100</b>			
			Terselenggaranya konvergensi program di Kampung KB								
			Operasional Penguatan Kampung KB di tingkat kab/kota	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	12.000.000	12.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon						BOKB
			penggunaan bantuan operasional pembekalan Pokja Kampung KB adalah Pokja yang terlatih								
			Pembekalan Pokja Kampung KB	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	42.800.000	42.800.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB								
			Pertemuan Pokja Kampung KB	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak 9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu 13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon	UPTD P5A Kecamatan	288.000.000	288.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				19. Weru 20. Kedawung 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Gegecik 29. Kaliwedi 30. Gebang 31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran 34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Greged 39. Suranenggala 40. Jamblang							
			Meningkatnya partisipasi Keluarga atau anggota Keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan								
			Operasional Ketahanan Keluarga Poktan	40 UPTD P5A Kecamatan : 1. Waled 2. Ciledug 3. Losari 4. Pabedilan 5. Babakan 6. Karangsembung 7. Lemahabang 8. Susukan Lebak	UPTD P5A Kecamatan	1.200.000.000	1.200.000.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				9. Sedong 10. Astanajapura 11. Pangenan 12. Mundu 13. Beber 14. Talun 15. Sumber 16. Dukupuntang 17. Palimanan 18. Plumbon 19. Weru 20. Kedawung 21. Gunungjati 22. Kapetakan 23. Klangeran 24. Arjawinangun 25. Panguragan 26. Ciwaringin 27. Susukan 28. Gegecik 29. Kaliwedi 30. Gebang 31. Depok 32. Pasaleman 33. Pabuaran 34. Karangwareng 35. Tengahtani 36. Plered 37. Gempol 38. Greged 39. Suranenggala 40. Jamblan							
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			<b>11.325.850.000</b>	<b>10.686.306.324</b>	<b>94,35</b>			

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>307.150.000</b>	<b>241.800.000</b>	<b>78,72%</b>			
			tersosialisasinya layanan PPKS/Satyagatra Balai Penyuluhan KB; dan Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling di PPKS/Satyagatra								
			Operasional kegiatan konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagatra) di Balai Penyuluhan KB	1 Balai Penyuluh KB (Kec. Suranenggala)	UPTD P5A Kecamatan	7.150.000	7.150.000	100	1 laporan	100	DAK NON FISIK BOKB
			Terdistribusikannya sarana BKB Kit Stunting untuk kelompok BKB								
			Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting	25 Desa Stunting : 1. Desa Tenjomaya Kec. Ciledug 2. Desa Jatiseeng Kidul Kec. Ciledug 3. Desa Karanganyar Kec. Karangwareng 4. Desa Sidawangi Kec. Sumber 5. Kel. Sumber Kec. Sumber 6. Desa Sendang Kec. Sumber 7. Desa Gegunung Kec. Sumber 8. Desa Tukmudal Kec. Sumber 9. Desa Cangkring Kec. Plered 10. Desa Kaliwulu Kec. Plered 11. Desa Kendal Kec. Astanajapura 12. Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	300.000.000	234.650.000	78,22%	1 Paket	100	DAK NON FISIK BOKB

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				13. Desa Surakarta Kec. Suranenggala 14. Desa Karang Sari Kec. Weru 15. Desa Beber Kec. Beber 16. Desa Budur Kec. Ciwaringin 17. Desa Gembongan Mekar Kec. Babakan 18. Desa Babakan Losari Lor Kec. Pabedilan 19. Desa Lungbenda Kec. Palimanan 20. Desa Karangmulya Kec. Plumbon 21. Desa Kalitengah Kec. Tengahtani 22. Desa Kempek Kec. Gempol 23. Desa Gebang Udik Kec. Gebang 24. Desa Mandala Kec. Dukupuntang 25. Desa Kertawinangun Kec. Kedawung								
			<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			11.018.700.000	10.444.506.324	94,79%				
			Output kegiatan Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan									

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 23 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko stunting berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan Keluarga di setiap wilayah.								
			Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting	424 Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	5.247.000.000	4.672.806.324	89,06%	5.247 Tim Pendamping Keluarga	100	DAK NON FISIK BOKB
			Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS; Ibu Hamil, Ibu pasca persalinan dan Keluarga memiliki anak usia 0- 23 bulan								
			Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting	424 Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	5.771.700.000	5.771.700.000	100	5.247 Tim Pendamping Keluarga	100	DAK NON FISIK BOKB
		<b>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMER</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>3.219.818.000</b>	<b>1.702.348.000</b>	<b>52,87%</b>			

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<b>57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>3.219.818.000</b>	<b>1.702.348.000</b>	<b>52,87%</b>			
			Fasyankes yang kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsinya terpenuhi								
			Pengadaan Implant Removal Kit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKM Gembongan</li> <li>2. PKM Karangsembung</li> <li>3. PKM Panguragan</li> <li>4. PKM Sedong</li> <li>5. PKM Kamarang</li> <li>6. PKM Nanggela</li> <li>7. PKM Ciwaringin</li> <li>8. PKM Mundu</li> <li>9. PKM Sumber</li> <li>10. PKM Sendang</li> <li>11. PKM Kubang Deleg</li> <li>12. PKM Klagenan</li> <li>13. KKB Plered</li> <li>14. PKM Pangkalan</li> <li>15. PKM Beber</li> <li>16. PKM Waled</li> <li>17. PKM Susukanlebak</li> <li>18. PKM Karang Sari</li> <li>19. PKM Wangunharja</li> <li>20. PKM Astanalanggar</li> <li>21. PKM Sindanglaut</li> <li>22. PKM Gempol</li> <li>23. PKM Kaliwedilor</li> </ol>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	230.000.000	214.860.000	93,42%	1 Paket	100	DAK FISIK
			Pengadaan Minilaparotomi/Tubectomi Set	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RSUD Arjawinangun</li> <li>2. RSU Universitas</li> </ol>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	52.000.000	50.138.000	96,42	1 Paket	100	DAK FISIK

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Muhammadiyah Cirebon	Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon						
			Pengadaan IUD Kit	1. PKM BABAKAN 2. PKM GUNUNGJATI 3. PKM PLUMBON 4. PKM SINDANGLAUT 5. PKM LOSARI 6. PKM SUMBER 7. PKM PALIMANAN 8. PKM KAMARANG 9. PKM CILEDUG 10. PKM KEDATON 11. PKM WANGUNHARJA 12. PKM WARUROYOM 13. PKM ASTAPADA 14. PKM CIBOGO 15. PKM GEGESIK 16. PKM PLERED 17. PKM KUBANGDELEG 18. PKM SEDONG 19. PKM KLANGENAN 20. PKM SUSUKAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	300.000.000	270.750.000	90,25	1 Paket	100	DAK FISIK
			Pengadaan Laparoscopi dengan kamera dan monitor	RS Sumber Waras	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	1.400.000.000	-	-	-	-	DAK FISIK
			Pengadaan Kendaraan Roda Dua Antar Jemput Calon Akseptor	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	1.221.000.000	1.155.000.000	94,59	33 unit	100	DAK FISIK

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	14.718.000	11.600.000	78,82	1 Laporan	100	DAK Fisik	
			Perjalanan Dinas Ke/Dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, Dan Pengawasan	OPD KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	2.100.000	-	-	-	-	DAK Fisik	
		<b>PERATURAN MENTERI NOMOR 8 TAHUN 2023 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>69.019.800</b>	<b>69.019.800</b>	<b>100</b>				
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>69.019.800</b>	<b>69.019.800</b>	<b>100</b>			
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				<b>69.019.800</b>	<b>69.019.800</b>	<b>100</b>			
			1. Pelatihan Manajemen Dan Penanganan Kasus Ktp/A Dan TPPO 2. Pelatihan Pencatatan Dan Pelaporan Kasus	1. Hotel Sutan Raja 2. Aula DPPKBP3A	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.019.800	69.019.800	100	1 Laporan	100	Bantuan Operasional PPA (BOPP)	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Ktp/A Dan TPPO		Kabupaten Cirebon						A)
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>336.979.800</b>	<b>285.167.833</b>	<b>84,62</b>			
			<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>336.979.800</b>	<b>285.167.833</b>	<b>84,62</b>			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak</li> <li>Pelaksanaan KIE pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak tinggi</li> <li>Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aula DPPKBP3A</li> <li>40 Kecamatan</li> <li>Kecamatan Susukan Lebak, Depok, Sumber, Palimanan, Klangeran, Jamblang</li> </ol>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	101.499.900	101.499.900	100	12 Laporan	100	Bantuan Operasional PPA (BOPPA)

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>pengecahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak</p> <p>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>								
			<p>1. Layanan Medikolegal</p> <p>2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli</p> <p>3. Layanan Rumah Perlindungan</p> <p>4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban</p> <p>5. Layanan Gelar Kasus (case conference)</p> <p>6. Layanan Kesehatan bagi Korban yang Tidak Dijamin BPJS dan Sumber Pendanaan Lainnya</p> <p>7. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban</p>	40 Kecamatan	DPPKBP3A Kab. Cirebon	235.479.900	183.667.933	78	99 Korban Kekerasan perempuan dan anak yang Terlayani	100	Bantuan Operasional PPA (BOPPA)
<b>JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT</b>						<b>24.680.361.254</b>	<b>22.446.122.557</b>	<b>90,95</b>			

### 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diterima dan Dilaksanakan

**Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>NIHIL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI</b>											

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hambatan/Permasalahan:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan di masing masing Unit Pelayanan Teknis (UPTD P5A) kecamatan mengalami kendala karena Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kasubag TU dalam membantu Pelaksanaan Administrasi SPJ dan Pelaksanaan Pelaporan Program Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan tidak berjalan baik karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan monitoring dan evaluasi ke setiap kantor UPTD P5A Kecamatan.
  - c. Dari 40 UPTD P5A Kecamatan Baru terbangun 26 Balai Penyuluh KB.
  - d. Banyaknya instansi yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat, namun koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak optimal. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih atau kekosongan layanan, yang menghambat pemenuhan hak anak.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Saran dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Saran dan Tindak Lanjut:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan di masing-masing kecamatan yang sekiranya dibagi dalam beberapa kelompok untuk Melaksanakan proses perlengkapan Administrasi SPJ dan Pelaporan Program kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - b. Monitoring tetap dilakukan sesuai jadwal dan jumlah orang, sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan mengundang Kepala UPTD P5A ke Kantor DPPKBP3A dengan cara membagi ke dalam beberapa kelompok;
  - c. Melakukan usulan DAK Fisik terkait Pembangunan Balai Penyuluh KB Ke BKKBN Provinsi dan Kementerian Keuangan.

- d. Pembentukan Pusat Koordinasi Perlindungan Anak Disarankan untuk membentuk satu pusat koordinasi atau sekretariat nasional yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Pusat ini akan bertindak sebagai penghubung antara lembaga dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang seragam dan tepat sasaran.

#### **IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **4.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

NIHIL

##### **4.2 Realisasi**

NIHIL

##### **4.3 Alokasi Anggaran**

NIHIL

##### **4.4 Dukungan Personil**

NIHIL

##### **4.5 Permasalahan dan Solusi**

NIHIL

##### **4.6 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

NIHIL

#### **V. PRESTASI-PRESTASI**

- a. Piagam Penghargaan Apresiasi PKB Terbaik Pembentuk Rumah Data Ku Tingkat Provinsi Jawa Barat. A.n Nurhadi,SE.SY PKB Kecamatan Kalngenan Harapan 2 Katagori Kabupaten Bulan Juli Tahun 2024;
- b. Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai PEMENANG SIPERINDU AWARD Kategori Fasilitator Terbanyak Tk Jabar (semester 1) a.n Kabupaten Cirebon Bulan Juli Tahun 2024;
- c. Piagam Penghargaan Apresiasi Pencatatan dan Pelaporan Data Program Bangga Kencana Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 a.n DPPKBP3A Kab. Cirebon Terbaik 3 Katagori Wilayah Besar Bulan Desember 2024;
- d. Piagam Penghargaan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Juara 2 Kategori Madrasah Aliyah a.n MAS Salafiyah Kab Cirebon;
- e. Piagam Penghargaan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **Juara 1** Kategori Madrasah Aliyah a.n MAN 4 Cirebon Kab Cirebon;

- f. Piagam Penghargaan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **Juara 3** Kategori Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan a.n SMK Samudra Nusantara Kab Cirebon;
- g. OPD pendukung PKK dalam Pelaporan dan Kegiatan GKSTTB sehingga menjadi Pemenang Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Juara 1 Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana (GKSTTB) Katagori Kabupaten;
- h. OPD Pendukung dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KKN Tematik Peduli Stunting a.n Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai Perguruan Tinggi Pelaksana KKB Tematik Peduli Stunting dengan OUTPUT TERBAIK (Rumah Dataku, Kampung KB, dan Dashat) di 6 Lokus Kabupaten Cirebon.




## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, untuk disampaikan sebagai bahan penyusunan pelaporan ditingkat selanjutnya.

## **VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**PENGHARGAAN DINAS PPKBP3A KAB. CIREBON  
TAHUN 2024**

No	Tanggal Penerimaan	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Eviden
1	Juli 2024	Apresiasi PKB Terbaik Pembentuk Rumah Data Ku Tingkat Provinsi Jawa Barat	Nurhadi,SE.S Y PKB Kecamatan Kalngenan Harapan 2 Katagori Kabupaten	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	
2	Juli 2024	Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai <b>PEMENANG SIPERINDU AWARD</b> Kategori Fasilitator Terbanyak Tk Jabar (semester 1)	Kabupaten Cirebon	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	
3	Desember 2024	Apresiasi Pencatatan dan Pelaporan Data Program Bangga Kencana Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	DPPKBP3A Kab. Cirebon Terbaik 3 Katagori Wilayah Besar	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	
4	Desember 2024	Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 <b>Juara 2</b> Kategori Madrasah Aliyah	MAS Salafiyah Kab Cirebon	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	
5	Desember 2024	Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 <b>Juara 1</b> Kategori Madrasah Aliyah	MAN 4 Cirebon Kab Cirebon	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	

6	Desember 2024	Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 <b>Juara 3</b> Kategori Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan	SMK Samudra Nusantara Kab Cirebon	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH																																																													
7	Oktober 2024	OPD pendukung PKK dalam Pelaporan dan Kegiatan GKSTTB sehingga menjadi Pemenang Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024:  Juara 1 Gerakan Keluarga Sehat Tangguh Bencana (GKSTTB) Katagori Kabupaten	Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Juara I, dan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Harapan	Pj. Ketua PKK Amanda Setyaningsih, S.E.,Akt.	 <p><b>PEMBERKARYAAN KEMENDIKEMAHKESKOL - PPKK - TIM PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT</b></p> <p>Bandung, 30 Oktober 2024</p> <p>1. Kecamatan Lomba Terbi Administrasi 2. Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2024 3. Lomba Gerakan Keluarga Sehat Tangguh Bencana (GKSTTB) Kabupaten 4. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kabupaten 5. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kota 6. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kecamatan 7. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kelurahan 8. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Desa 9. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Dusun 10. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) RT/RW</p> <p>Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai surat kami Nomor 1023/SMK/PPK/Prov/10/2024 tanggal 10 Agustus 2024 perihal Verifikasi/Checking Unggulan Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2024 sebagai berikut:</p> <p>1. Kecamatan Lomba Terbi Administrasi 2. Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2024 3. Lomba Gerakan Keluarga Sehat Tangguh Bencana (GKSTTB) Kabupaten 4. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kabupaten 5. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kota 6. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kecamatan 7. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Kelurahan 8. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Desa 9. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) Dusun 10. Lomba Pengabdian Masyarakat (PkM) RT/RW</p> <p>Sehubungan hasil penilaian tersebut, diperoleh Perolehan Terbaik Kategori Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut, untuk itu kami mengucapkan Selamat</p> <p>Selagi pemenang lomba Juara I s.d Juara II mendapatkan medali, piagam dan tabung berisi uang yang akan dibagikan kemudian, selanjutnya mohon penanggung jawab pengorganisasian menyerahkan administrasi Juara I s.d II menggunakan Foto n.P. Foto NPWP dan Foto Buku Tabung yang sudah ada. Data (GKSTTB) sudah, untuk Juara Harapan dapat menggunakan Kartu Pokok Provinsi masing-masing.</p> <p>Dengan ini sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p>Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat 2. Atas</p> <p>Dibuat dan ditandatangani oleh: Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon Amanda Setyaningsih, S.E., Akt.</p> <p><b>D. Pajaja IV - Lomba Gerakan Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana (GKSTTB)</b></p> <p>1. Kategori Kabupaten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESA</th> <th>KECAMATAN</th> <th>KABUPATEN</th> <th>PERINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Desa Buyut</td> <td>Kec. Gunung Jati</td> <td>Kab. Cirebon</td> <td>Juara I</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Desa Cihayang</td> <td>Kec. Pasawahan</td> <td>Kab. Purwakarta</td> <td>Juara II</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Desa Cikuruli</td> <td>Kec. Tempuran</td> <td>Kab. Karawang</td> <td>Juara III</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Desa Bojongmangu</td> <td>Kec. Bojongmangu</td> <td>Kab. Bekasi</td> <td>Harapan I</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Desa Cibanten</td> <td>Kec. Cipulang</td> <td>Kab. Pangandaran</td> <td>Harapan II</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Desa Panundian</td> <td>Kec. Ciledes</td> <td>Kab. Bandung</td> <td>Harapan III</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Kategori Kota</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESA / KELURAHAN</th> <th>KECAMATAN</th> <th>KOTA</th> <th>PERINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kelurahan Kebon Pedes</td> <td>Kec. Tanah Sereal</td> <td>Kota Bogor</td> <td>Juara I</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kelurahan Walas</td> <td>Kec. Bandung Kidul</td> <td>Kota Bandung</td> <td>Juara II</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelurahan Jipwari</td> <td>Kec. Banjar</td> <td>Kota Banjar</td> <td>Juara III</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kelurahan Kalijaga</td> <td>Kec. Harjamukti</td> <td>Kota Cirebon</td> <td>Harapan</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PERINGKAT	1.	Desa Buyut	Kec. Gunung Jati	Kab. Cirebon	Juara I	2.	Desa Cihayang	Kec. Pasawahan	Kab. Purwakarta	Juara II	3.	Desa Cikuruli	Kec. Tempuran	Kab. Karawang	Juara III	4.	Desa Bojongmangu	Kec. Bojongmangu	Kab. Bekasi	Harapan I	5.	Desa Cibanten	Kec. Cipulang	Kab. Pangandaran	Harapan II	6.	Desa Panundian	Kec. Ciledes	Kab. Bandung	Harapan III	NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA	PERINGKAT	1.	Kelurahan Kebon Pedes	Kec. Tanah Sereal	Kota Bogor	Juara I	2.	Kelurahan Walas	Kec. Bandung Kidul	Kota Bandung	Juara II	3.	Kelurahan Jipwari	Kec. Banjar	Kota Banjar	Juara III	4.	Kelurahan Kalijaga	Kec. Harjamukti	Kota Cirebon	Harapan
NO.	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PERINGKAT																																																													
1.	Desa Buyut	Kec. Gunung Jati	Kab. Cirebon	Juara I																																																													
2.	Desa Cihayang	Kec. Pasawahan	Kab. Purwakarta	Juara II																																																													
3.	Desa Cikuruli	Kec. Tempuran	Kab. Karawang	Juara III																																																													
4.	Desa Bojongmangu	Kec. Bojongmangu	Kab. Bekasi	Harapan I																																																													
5.	Desa Cibanten	Kec. Cipulang	Kab. Pangandaran	Harapan II																																																													
6.	Desa Panundian	Kec. Ciledes	Kab. Bandung	Harapan III																																																													
NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA	PERINGKAT																																																													
1.	Kelurahan Kebon Pedes	Kec. Tanah Sereal	Kota Bogor	Juara I																																																													
2.	Kelurahan Walas	Kec. Bandung Kidul	Kota Bandung	Juara II																																																													
3.	Kelurahan Jipwari	Kec. Banjar	Kota Banjar	Juara III																																																													
4.	Kelurahan Kalijaga	Kec. Harjamukti	Kota Cirebon	Harapan																																																													
8	27 September 2024	Prestasi yang diraih sebagai perguruan tinggi pelaksanaan KKN Tematik Peduli Stunting dengan Output Terbaik (Rumah Dataku, Kampung KB, dan Dashat) di 6 lokus Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat an. Fazar Supriadi Sentosa, SH	 <p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> Nomor: 43/PD.04/I/2024</p> <p>Diberikan kepada: <b>Universitas Muhammadiyah Cirebon</b></p> <p>Atas prestasi yang diraih sebagai Perguruan Tinggi pelaksanaan KKN Tematik Peduli Stunting dengan OUTPUT TERBAIK (Rumah Dataku, Kampung KB, dan Dashat) di 6 lokus Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon</p> <p>27 September 2024</p> <p>Fazar Supriadi Sentosa, SH Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat</p>																																																												

9	29 Juni 2024	Pelayanan KB Serentak terbanyak dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-31 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	DPPKBP3 A Kabupaten Cirebon	BKKBN Provinsi Jawa Barat	
10	29 Juni 2024	Juara Terbanyak ke-2 Wilayah II Katagori Capaian Total Pelayanan KB MKJP dalam Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	DPPKBP3 A Kabupaten Cirebon	BKKBN Provinsi Jawa Barat	
11	29 Juni 2024	Juara Terbanyak ke-2 Wilayah II Katagori Capaian Total Pelayanan KB MKJP HUT IB dalam HARGANAS Ke-31 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	DPPKBP3 A Kabupaten Cirebon	BKKBN Provinsi Jawa Barat	
12	29 Juni 2024	Kabupaten dengan Entry Pendampingan Calon Pengantin Terbanyak Melalui Aplikasi Elsimil pada Momentum Pelayanan Catin Serentak Tahun 2024	DPPKBP3 A Kabupaten Cirebon	BKKBN Provinsi Jawa Barat	
13	24 Juni 2024	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Lansia Standar 1 Tahun 2024	DPPKBP3 A Kabupaten Cirebon	BKKBN Provinsi Jawa Barat	

14	24 Desember 2024	Juara III Katagori Pembina Teladan KB Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-96 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Adang Kadarusman, SE	Gubernur Jawa Barat	
15	15 November 2024	Sertifikat standarisasi satuan pendidikan ramah anak (SRA) yang dilaksanakan pada bulan April – Oktober 2024	TK Negeri Pembina Sumber	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	
16	20 Desember 2024	Piagam Penghargaan Juara II Kategori Kabupaten Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);	Kabupaten Cirebon	Pj. Gubernur Jawa Barat	
17	20 Desember 2024	Piagam Penghargaan HeForShe Keterlibatan Laki-Laki dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Tahun 2024 Kepada Pj. Bupati Cirebon Drs. H. Wahyu Mijaya, SH.,M.Si Tingkat Provinsi Jawa Barat	Pj. Bupati Cirebon Drs. H. Wahyu Mijaya, SH.,M.Si	Pj. Gubernur Jawa Barat	

18	20 Desember 2024	Piagam Penghargaan Implementasi Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten/Kota terbaik tahun 2024 kepada Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Pj. Gubernur Jawa Barat	 <p>The image shows a framed certificate with a gold border. The text on the certificate reads: 'GUBERNUR JAWA BARAT', 'Piagam Penghargaan', 'Nomor: 303/Kep.006/443/2024', 'Pj. Gubernur Jawa Barat, dengan ini menobatkan Penghargaan Kepada', 'Kabupaten Cirebon', 'Sebagai', 'Implementasi Sekolah Perempuan Jawa Barat Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2024', and 'Bandung, 20 Desember 2024'. There is a blue circular stamp at the bottom right of the certificate.</p>
----	------------------	---	-------------------	-------------------------	--



**1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon**

**IKK Outcome No.2.m.1  
 TFR (Angka Kelahiran Total)**

**Penjelasan IKK Outcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
<b>Rumus</b>	:	$FR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR=Angka Kelahiran Total          ASFR=Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  <math>b_i</math> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <math>i</math> pada tahun tertentu  <math>p_i</math> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <math>i</math> pada pertengahan tahun yang sama</p> <p><math>I</math> = kelompok umur  <math>i</math> = untuk kelompok umur 15-19  <math>i</math> = untuk kelompok umur 20-24,.....s.d  <math>i</math> = untuk kelompok Umur 45-49  <math>k</math> Bilangan Konstan tabiasanya 1000</p>
<b>Satuan Hasil</b>	:	2,12 Poin
<b>Definisi Operasional</b>	:	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).
<b>Data Pendukung</b>	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). <b>Sumber Data</b> :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

<b>Regulasi</b>	:	▪ Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.
-----------------	---	---

Sumber Data : Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 07 Maret 2025  
Plh, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS.**  
Pembina Tk.I

NIP. 19680119 200011 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

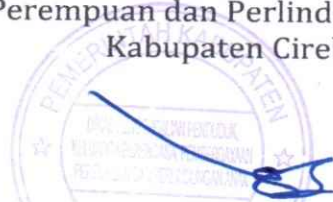
**ANGKA KELAHIRAN TOTAL(TFR)TAHUN 2024**  
**DI KABUPATEN CIREBON**

No	Kelompok Umur	ASFR
1.	15-19Tahun	21,3
2.	20-24Tahun	96,5
3.	25-29Tahun	124,6
4.	30-34Tahun	102,7
5.	35-39Tahun	59,8
6.	40-44Tahun	18,4
7.	45-49Tahun	2,5

Sumber Data : Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Nomer : B-176/LP.02/J10/2025, tanggal 06 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan TFR dan ASFR tahun 2024 untuk **TFR Kab. Cirebon 2,12 Poin**. Adapun Hasil penghitungan TFR dan ASFR untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Tingkat kabupaten/kota berdasarkan data Pemutakhiran PK-24 terlampir.

Sumber, 07 Maret 2025  
Plh, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon





**dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680119 200011 2 001




**Kemendukbangga/  
BKKBN**

**Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/BKKBN**  
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

 Jl. Surapati No. 122,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40122

 (022) 7203806 - 7207083

 [www.jabar.bkkbn.go.id](http://www.jabar.bkkbn.go.id)

Nomor : B-176/LP.02/J10/2025

Bandung, 06 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Penyampaian Hasil Penghitungan TFR dan ASFR tahun 2024

**Kepada Yth:**

**Kepala Dinas OPD KB Kabupaten dan Kota**

**Se-Jawa Barat**

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penghitungan TFR dan ASFR tingkat nasional dan provinsi Tahun 2024, Kedeputan Bidang Pengendalian Penduduk selanjutnya telah menghitung pada level kabupaten dan kota.

Penghitungan pada level ini juga menjadi penting mengingat kedua indikator tersebut merupakan indikator yang masuk ke dalam indikator RPJMD. Hasil penghitungan TFR dan ASFR untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tingkat kabupaten/kota berdasarkan data Pemutakhiran PK-24 beserta catatannya dapat diakses pada tautan berikut: [https://bit.ly/Indikator\\_Kinerja\\_Jabar\\_2024](https://bit.ly/Indikator_Kinerja_Jabar_2024).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Bandung, 6 Maret 2025

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi  
Jawa Barat.



Dadi A Roswandi

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja ZI WBBM berkomitmen mengedepankan pelayanan prima, menolak gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme dan benturan kepentingan.  
Saluran Pengaduan dan Whistle Blowing System (WBS):  
Email: [pengawasanbkkbnjabar@gmail.com](mailto:pengawasanbkkbnjabar@gmail.com),  
WhatsApp Message: 085186682030  
Saran dan Masukan : <https://saran.bkkbnjabar>

Tembusan:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

**Lampiran Surat**

Nomor : B-176/LP.02/J10/2025

Tanggal : 06 Maret 2025

## Daftar Tujuan Surat:

1. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor
2. Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi
3. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Cianjur
4. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung
5. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Garut
6. Kepala Dinsos PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya
7. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Ciamis
8. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuningan
9. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
10. Kepala DP3AKB Kabupaten Majalengka
11. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sumedang
12. Kepala Disduk P3A Kabupaten Indramayu
13. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang
14. Kepala DPPKB Kabupaten Purwakarta
15. Kepala DPPKB Kabupaten Karawang
16. Kepala DPPKB Kabupaten Bekasi
17. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat
18. Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran
19. Kepala DPPKB Kota Bogor
20. Kepala DPPKBP3APM Kota Sukabumi
21. Kepala DPPKB Kota Bandung
22. Kepala DP3AP2KB Kota Cirebon
23. Kepala DPPKB Kota Bekasi
24. Kepala DP3AP2KB Kota Depok
25. Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi
26. Kepala DP2KBP3A Kota Tasikmalaya
27. Kepala DPPKB Kota Banjar

Kode	Kab/Kota	LF SP 2020		Tahun 2023			TFR Proy25	Tahun 2024							
		TFR	ASFR 15-19	TFR	ASFR 15-19	Catatan		TFR	ASFR						
									15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1	BEKASI	1,97	10,0	1,95	6,3		1,91	1,89	7,0	66,2	126,4	98,2	58,6	19,7	1,9
2	KARAWANG	2,05	20,9	2,01	27,6		1,97	2,02	27.7*	93,6	113,3	94,0	55,0	19,4	2,9
3	PURWAKARTA	2,35	25,7	2,31	26,1		2,18	2,28	25.8*	105,7	132,4	103,7	62,8	22,6	4,3
4	BOGOR	2,02	25,0	1,98	18,9		1,95	1,92	17,1	87,0	115,3	85,1	56,6	20,5	3,2
5	SUKABUMI	2,12	32,0	2,02	21,4		2,02	2,04	21,7	94,4	112,4	92,1	62,8	22,6	2,4
6	CIANJUR	2,31	32,3	2,28	28,5		2,15	2,21	26,7	105,8	119,7	93,7	66,4	25,7	3,4
7	BANDUNG	2,09	27,0	2,07	22,7		2,00	2,09	21,4	94,3	125,9	91,1	60,1	22,9	2,1
8	BANDUNG BARAT	2,24	33,3	2,12	26,7		2,10	2,15	21,0	99,7	126,1	95,2	62,8	22,1	2,8
9	SUMEDANG	2,06	30,5	2,02	30,6		1,97	1,99	28,4	96,4	119,3	85,4	49,9	16,9	2,0
10	GARUT	2,45	36,3	2,37	32,5		2,25	2,35	26,9	108,2	131,4	101,2	72,3	26,1	3,9
11	TASIKMALAYA	2,25	29,1	2,15	30,3		2,11	2,11	29.7*	108,1	121,6	90,5	52,6	18,5	2,3
12	CIAMIS	2,23	18,8	2,15	19,2	INTERPOLASI	2,10	2,15	18,8	110,8	124,8	92,8	60,1	21,1	1,8
13	CIREBON	2,19	19,9	2,11	21,2		2,07	2,12	21.3*	96,5	124,6	102,7	59,8	18,4	2,5
14	KUNINGAN	2,26	15,7	2,14	14,3		2,11	2,14	11,2	93,3	135,4	99,0	65,3	22,1	1,7
15	INDRAMAYU	2,11	28,1	2,06	26,7		2,01	2,04	26,5	81,7	109,0	95,0	68,3	23,1	3,7
16	MAJALENGKA	2,17	20,0	2,10	21,3		2,05	2,09	18,9	101,6	123,6	91,4	62,2	19,1	1,4
17	SUBANG	2,15	43,7	2,08	35,7		2,04	2,04	35*	99,2	110,6	92,5	52,8	16,9	2,6
18	KOTA BANDUNG	1,83	10,3	1,79	12,7		1,79	1,83	9,7	73,0	116,8	90,7	55,8	17,1	1,9
19	KOTA CIREBON	2,03	11,5	2,02	19,2		1,95	1.97**	18,7	84,2	127,2	94,7	54,1	14,5	1,5
20	KOTA BOGOR	1,87	9,3	1,84	9,8		1,84	1,89	9,9	71,9	120,7	92,3	59,9	20,8	2,0
21	KOTA SUKABUMI	2,16	13,1	2,12	14,6		2,05	2,17	15,2	95,5	132,6	98,6	65,9	23,1	2,8
22	KOTA BEKASI	1,85	6,0	1,83	7,7		1,83	1,81	5,2	56,5	126,7	96,4	57,8	17,9	1,7
23	KOTA DEPOK	1,99	9,2	1,95	7		1,92	1,96	6,7	67,3	139,2	99,0	58,9	18,3	1,8
24	KOTA CIMAHI	2,05	12,5	2,01	12,1		1,97	1,98	11,8	84,2	125,6	94,0	59,8	18,2	1,5
25	KOTA TASIKMALAYA	2,19	12,8	2,1	14,3		2,10	2,14	13,2	97,7	130,1	99,0	62,2	23,0	2,4
26	KOTA BANJAR	2,23	19,7	2,2	19,6		2,10	2.13**	19,4	98,8	129,8	100,6	58,0	16,9	2,1
27	PANGANDARAN	2,22	58,2	2,2	32,9		2,10	2,14	32.7*	107,0	124,5	95,5	49,2	16,5	2,3
	PROVINSI JAWA BARAT	2,11	24,5	2,06	22,4		2,01	2,03	18,7	87,7	121,9	93,6	61,2	20,3	2,4

**Keterangan:**

- \* : Adjustment dengan Pola ASFR 2023
- \*\* : Interpolasi TFR berdasarkan LF 2020 dan proyeksi 2025 serta Adjustment dengan Pola ASFR 2023

**Catatan:**

Berikut beberapa catatan dan rangkuman dari penghitungan indikator TFR dan ASFR 15-19 tahun, Tahun 2024 tingkat Kab/Kota:

- 1 Data yang digunakan berasal dari data Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024
- 2 Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia/PK 2024 merupakan data sample sehingga perlu dilakukan pembobotan. Pembobotan data mempertimbangkan faktor wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kelompok umur yang mengacu pada data proyeksi penduduk tahun 2024 dari publikasi BPS tahun 2024
- 3 Penghitungan indikator TFR dan ASFR 15-19 tahun berdasarkan Data Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024 tidak dapat dilakukan secara mandiri karena memerlukan tambahan data Umur Harapan Hidup (UHH) yang diambil dari publikasi BPS tahun 2024
- 4 Metode penghitungan menggunakan metode tidak langsung yaitu metode Anak Kandung atau *Own Children Method (OCM)* dengan aplikasi *Fert*. Penghitungan TFR dan ASFR 15-19 tahun berdasarkan *grouping* tahun hasil *output* aplikasi *Fert* yang paling mendekati *tren* data sebelumnya serta proyeksi indikator TFR dari BPS
- 5 Hasil penghitungan TFR dan ASFR 15-19 tahun untuk Tahun 2024 menggunakan Data Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024
- 6 Dari 514 Kabupaten/Kota, terdapat 433 Kabupaten/Kota (84,24%) merupakan TFR hasil penghitungan berdasarkan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024
- 7 81 Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan teknik interpolasi dikarenakan hasil penghitungan menggunakan data Pemutakhiran PK-24 terlalu jauh dari rentang hasil TFR Kabupaten/Kota tahun 2023 dan Proyeksi TFR 2025.
- 8 Pada penghitungan ASFR 15-19 tahun, dilakukan adjusment terhadap 183 (35%) Kabupaten/Kota dikarenakan selisih perbedaan dengan ASFR 15-19 tahun pada tahun 2023 terlalu besar



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**IKKOutcomeNo.2.m.2**

**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

**PenjelasanIKKOutcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur Tingkat pemakaian kontrasepsi modern
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $\frac{249.779}{386.138} \times 100\%$
<b>SatuanHasil</b>	:	64,6865%
<b>DefinisiOperasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota.</li></ul>

<b>Data Pendukung</b>	<p>: ▪ <b>Pembilang</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kopsurat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. <b>Sumber Data:</b> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p> <p>▪ <b>Penyebut</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kopsurat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. <b>Sumber Data:</b> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>
<b>Regulasi</b>	<p>: ▪ Perka BKKBN RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.</p>

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN 2024**  
**DI KABUPATEN CIREBON**

KODE	KABUPATEN/ KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKT OMI	TUBEKT OMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
<b>KAB. CIREBON</b>												
01	WALED	5.456	4.318	378	41	241	337	2	139	-	5.456	-
02	CILEDUG	5.045	3.004	917	131	129	581	7	248	3	5.020	25
03	LOSARI	6.214	4.423	817	132	308	349	11	135	16	6.191	23
04	PABEDILAN	6.517	5.117	414	43	412	419	1	99	1	6.506	11
05	BABAKAN	8.192	6.315	811	83	208	468	10	219	15	8.129	63
06	KARANGSEMBUNG	3.907	2.617	439	39	393	137	5	275	-	3.905	2
07	LEMAHABANG	5.802	4.161	626	65	345	334	7	240	1	5.779	23
08	SUSUKAN LEBAK	4.906	3.552	460	46	325	307	4	203	2	4.899	7
09	SEDONG	4.946	3.804	421	57	198	233	1	225	-	4.939	7
10	ASTANAJAPURA	9.265	6.572	1.305	173	432	376	6	278	66	9.208	57
11	PANGENAN	6.462	4.249	1.288	114	589	114	5	92	-	6.451	11
12	MUNDU	10.630	7.548	1.309	185	688	451	12	400	1	10.594	36
13	BEBER	5.892	3.728	995	102	421	347	7	286	1	5.887	5
14	TALUN	10.104	6.278	1.625	284	754	609	14	500	12	10.076	28
15	SUMBER	10.286	6.568	1.268	146	728	908	7	623	4	10.252	34
16	DUKUPUNTANG	9.223	5.959	1.840	160	397	448	8	383	7	9.202	21
17	PALIMANAN	6.432	4.502	939	104	288	314	9	267	-	6.423	9
18	PLUMBON	9.453	6.497	1.145	111	495	752	9	420	1	9.430	23
19	WERU	7.568	4.838	1.426	166	279	512	7	288	2	7.518	50
20	KEDAWUNG	4.522	2.579	618	63	414	622	5	210	-	4.511	11

KODE	KABUPATEN/ KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASESI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKT OMI	TUBEKT OMI	MAL	TOTAL	
KAB. CIREBON												
21	GUNUNG JATI	6.792	4.497	1.167	191	248	437	4	232	-	6.776	16
22	KAPETAKAN	5.320	3.576	1.158	127	276	84	7	84	-	5.312	8
23	KLANGENAN	5.196	3.759	680	67	289	222	5	164	1	5.187	9
24	ARJAWINANGUN	6.304	3.674	1.399	67	531	416	10	185	2	6.284	20
25	PANGURAGAN	3.229	2.238	304	53	436	128	2	63	-	3.224	5
26	CIWARINGIN	4.326	2.325	876	267	438	293	5	120	-	4.324	2
27	SUSUKAN	5.233	3.797	716	53	312	262	2	89	-	5.231	2
28	GEGESIK	6.520	4.440	1.183	115	467	181	2	125	4	6.517	3
29	KALIWEDI	4.712	2.590	1.327	113	422	184	2	71	-	4.709	3
30	GEBANG	7.021	4.971	1.085	77	259	398	8	187	-	6.985	36
31	DEPOK	7.868	4.187	2.579	176	438	290	1	171	2	7.844	24
32	PASALEMAN	3.748	2.368	486	81	327	366	-	106	1	3.735	13
33	PABUARAN	4.386	3.047	506	79	391	259	1	91	2	4.376	10
34	KARANGWARENG	3.770	2.459	594	85	260	230	4	134	-	3.766	4
35	TENGAH TANI	5.610	2.497	2.028	98	386	374	5	206	-	5.594	16
36	PLERED	6.568	3.925	1.275	184	312	398	13	403	1	6.511	57
37	GEMPOL	5.070	3.496	717	46	414	234	3	150	1	5.061	9
38	GREGED	7.711	5.361	921	93	580	311	24	402	-	7.692	19
39	SURANENGGALA	4.734	3.319	903	52	146	193	2	103	6	4.724	10
40	JAMBLANG	5.557	3.448	987	94	606	238	2	176	-	5.551	6
JUMLAH TOTAL		250.497	166.603	39.932	4.363	15.582	14.116	239	8.792	152	249.779	718

Sumber : Bidang Dalduk P&P dan Bidang KB-K3 Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR TAHUN 2024**  
**DIKABUPATEN/KOTA CIREBON**

No	Kabupaten / Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
	<b>Kab. Cirebon</b>	
1.	WALED	10.020
2.	CILEDUG	7.305
3.	LOSARI	10.146
4.	PABEDILAN	10.863
5.	BABAKAN	12.527
6.	KARANGSEMBUNG	6.146
7.	LEMAHABANG	8.448
8.	SUSUKAN LEBAK	7.381
9.	SEDONG	7.297
10.	ASTANAJAPURA	13.703
11.	PANGENAN	8.904
12.	MUNDU	15.452
13.	BEBER	8.053
14.	TALUN	12.602
15.	SUMBER	16.829
16.	DUKUPUNTANG	11.533
17.	PALIMANAN	10.513
18.	PLUMBON	15.093
19.	WERU	10.450
20.	KEDAWUNG	7.903
21.	GUNUNGJATI	11.691
22.	KAPETAKAN	9.250
23.	KLANGENAN	8.588
24.	ARJAWINANGUN	8.790
25.	PANGURAGAN	10.020
26.	CIWARINGIN	7.311
27.	SUSUKAN	11.219
28.	GEGESIK	11.081
29.	KALIWEDI	7.847
30.	GEBANG	10.145
31.	DEPOK	11.490
32.	PASALEMAN	5.143
33.	PABUARAN	6.539
34.	KARANGWARENG	4.964
35.	TENGAHTANI	9.046
36.	PLERED	8.991
37.	GEMPOL	8.435

No	Kabupaten / Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
38.	GREGED	11.499
39.	SURANENGGALA	8.033
40.	JAMBLANG	8.224
<b>Jumlah</b>		<b>386.138</b>

Sumber : Bidang Dalduk P&P dan Bidang KB-K3 Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**IKKO outcome No.2.m.3**

**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)**

**Penjelasan IKK Outcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak terpenuhi ( <i>unmetneed</i> )
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber -KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $\frac{33.243}{386.138} \times 100\%$
<b>SatuanHasil</b>	:	8,6091%
<b>DefinisiOperasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi di wilayah kabupaten/kota.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota.</li></ul>

<p><b>Data Pendukung</b></p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (unmet need) di wilayah kabupaten/kota. <b>Sumber Data :</b> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>▪ <b>Penyebut</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. <b>Sumber Data :</b> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> </ul>
<p><b>Regulasi</b></p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.</li> </ul>

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**JUMLAH PESERTA PUS, PESERTA KB, BUKAN PESERTA KB JANUARI SAMPAI  
DESEMBER TAHUN 2024  
KABUPATEN CIRIBON**

No	Kecamatan	PUS Bukan Peserta KB				
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	UNMETNEED
1.	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	WALED	0	1.178	269	914	1.183
2.	CILEDUG	2	728	142	268	410
3.	LOSARI	1	991	450	563	1.013
4.	PABEDILAN	0	1.503	493	536	1.029
5.	BABAKAN	2	1.082	544	471	1.015
6.	KARANGSEMBUNG	0	697	116	389	505
7.	LEMAHABANG	0	672	180	335	515
8.	SUSUKAN LEBAK	1	740	99	330	429
9.	SEDONG	0	593	133	432	565
10.	ASTANAJAPURA	0	1.106	325	516	841
11.	PANGENAN	0	698	278	340	618
12.	MUNDU	0	1.522	443	691	1.134
13.	BEBER	3	656	94	256	350
14.	TALUN	0	697	94	175	269
15.	SUMBER	0	1.760	583	1.535	2.118
16.	DUKUPUNTANG	0	608	207	310	517
17.	PALIMANAN	1	1.026	513	802	1.315
18.	PLUMBON	1	1.662	367	1.008	1.375
19.	WERU	0	834	203	369	572
20.	KEDAWUNG	0	722	311	1.022	1.333
21.	GUNUNGJATI	1	1.279	468	1.288	1.756
22.	KAPETAKAN	0	1.232	458	194	652
23.	KLANGENAN	0	764	388	803	1.192
24.	ARJAWINANGUN	1	875	240	146	386
25.	PANGURAGAN	0	1.158	189	1.156	1.345
26.	CIWARINGIN	8	799	130	101	231
27.	SUSUKAN	2	1.389	826	549	1.375
28.	GEGESIK	0	1.150	487	870	1.357
29.	KALIWEDI	0	634	556	396	952
30.	GEBANG	1	484	348	432	780
31.	DEPOK	0	999	321	674	995
32.	PASALEMAN	0	362	82	284	366
33.	PABUARAN	1	653	110	177	287
34.	KARANGWARENG	1	317	58	165	223
35.	TENGAHTANI	0	1.312	193	455	648
36.	PLERED	0	671	192	513	705

37.	GEMPOL	0	1.038	350	458	808
38.	GREGED	2	1.178	269	360	629
39.	SURANENGGALA	1	818	442	566	1.008
40.	JAMBLANG	0	750	130	312	442
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>37.337</b>	<b>12.081</b>	<b>21.161</b>	<b>33.243</b>

Sumber : Bidang Dalduk P&P dan Bidang KB-K3 Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon

**Keterangan**

1. PUS = Pasangan Usia Subur
2. IAS = Ingin Anak Segera
3. IAD = Ingin Anak Ditunda
4. TIAL = Tidak Ingin Anak Lagi
5. Unmetneed = PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 00



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR TAHUN 2024**  
**DIKABUPATEN CIREBON**

No	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
1.	WALED	10.020
2.	CILEDUG	7.305
3.	LOSARI	10.146
4.	PABEDILAN	10.863
5.	BABAKAN	12.527
6.	KARANGSEMBUNG	6.146
7.	LEMAHABANG	8.448
8.	SUSUKAN LEBAK	7.381
9.	SEDONG	7.297
10.	ASTANAJAPURA	13.703
11.	PANGENAN	8.904
12.	MUNDU	15.452
13.	BEBER	8.053
14.	TALUN	12.602
15.	SUMBER	16.829
16.	DUKUPUNTANG	11.533
17.	PALIMANAN	10.513
18.	PLUMBON	15.093
19.	WERU	10.450
20.	KEDAWUNG	7.903
21.	GUNUNGJATI	11.691
22.	KAPETAKAN	9.250
23.	KLANGENAN	8.588
24.	ARJAWINANGUN	8.790
25.	PANGURAGAN	10.020
26.	CIWARINGIN	7.311
27.	SUSUKAN	11.219
28.	GEGESIK	11.081
29.	KALIWEDI	7.847
30.	GEBANG	10.145
31.	DEPOK	11.490
32.	PASALEMAN	5.143
33.	PABUARAN	6.539
34.	KARANGWARENG	4.964
35.	TENGAHTANI	9.046
36.	PLERED	8.991
37.	GEMPOL	8.435

No	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
38.	GREGED	11.499
39.	SURANENGGALA	8.033
40.	JAMBLANG	8.224
<b>Jumlah</b>		<b>386.138</b>

Sumber : Bidang Dalduk P&P dan Bidang KB-K3 Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**2. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**IKK Outcome No. 2.g.1**

**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**

**Penjelasan IKK Outcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$ $\frac{536.678.380.833}{4.087.368.357.925} \times 100\%$
<b>Satuan Hasil</b>	:	13,1302%
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota.</li> <li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.</li> </ul>
<b>Data Pendukung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

	<p><b>Sumber Data</b> : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>▪ <b>Penyebut</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja langsung APBD kabupaten/kota.</p> <p><b>Sumber Data</b> : Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>
<p><b>Regulasi</b></p>	<p>▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah</p> <p>▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah</p> <p>▪ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah</p>

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENISUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**PENDATAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH  
YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN GAP DAN GBS**

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.756.343.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	95.046.860
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.086.616
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	647.746.604
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	132.000.000
3.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda Pelopor	127.735.600
		Pembinaan Organisasi kepemudaan	139.999.825
		Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	40.000.000
		Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	143.950.000
4.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	177.025.200
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro	18.521.000
6.	DINAS PERTANIAN	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	171.360.000
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	226.870.150
7.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	799.335.500
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	714.358.500
8.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan RPJMD	480.960.000
		Penguatan CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	100.000.000
		Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa	300.000.000

		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	150.000.000
		Review Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	300.000.000
		Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	350.000.000
9.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	35.025.099
10.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	735.090.000
11.	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.243.109.500
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.633.179.506
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	685.234.550
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	313.270.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	180.541.500
12.	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	250.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	399.750.980
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	249.999.300
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	139.999.880
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	149.999.900
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	506.067.343.588
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1.520.500.000
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	300.105.235
14.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.768.410.500
15.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.502.861.600
16.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	48.084.300
17.	DINAS SOSIAL	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	230.050.100
		Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	180.100.050

		Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	514.780.000
		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	99.550.000
		Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1.455.908.000
		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	112.399.000
		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial	350.000.000
18.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	138.899.850
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.959.800
19.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan daerah rawan pangan	135.399.900
20.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	248.515.500
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8.575.000
		Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan	93.649.900
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	111.150.300
		UP2K	2.000.000
		Stimulan Bantuan terhadap Program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	200.000.000
23.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERIINDUNGAN ANAK	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	166.997.900
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah pada Kewenangan Kabupaten/Kota	185.995.700
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	609.104.900
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan	146.224.400
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	465.200.700
24.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Marka Jalan	560.400.000
		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	396.666.840
		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	449.899.900
25.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan	796.194.600

		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event	1.974.168.900
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.156.991.400
		Penyelenggaraan, Penembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	748.933.100
26.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	137.696.400
		Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	153.800.000
<b>TOTAL</b>			<b>536.678.380.833</b>

**Sumber : DP3AKB Kabupaten Cirebon dan OPD Kab. Cirebon**  
Lampirkan : Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG

**Berdasarkan LRA LKPD tahun 2024 didapatkan rincian anggaran sebagai berikut :**

<b>Belanja Operasi (Belanja Barang, Hibah, Bansos)</b>	<b>: Rp. 3.573.233.009.852</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>: Rp. 514.135.348.073</b>
<b>Total</b>	<b>: Rp. 4.087.368.357.925</b>

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN**  
**PPRG PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Simpulan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon:

- a. Pengelola kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- b. Pengelola tugas pembantu pelaksanaan program nasional dan provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- c. Pengumpulan data Anggaran Resposif Gender di daerah;
- d. Pelaksana monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan uraian tugas sebagaimana tersebut diatas, sebagai upaya guna mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan, maka selanjutnya Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak menyusun program dan kegiatan, dimana program dan kegiatan tersebut di

wujudkan dalam pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

**2. Saran**

Kesetaraan Gender berarti kesamaan kondisi bagi laki - laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan Gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen di daerah dari mulai perencanaan samapi dengan pelaksanaan di setiap SKPD dan Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan/Desa yang dituangkan dalam program kegiatan.

## BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

### 1. Data Umum

#### a. Dasar

- INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2018 Tentang :Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pengarusutamaan Gender di kabupaten Cirebon;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cirebon.

#### b. Tujuan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun kerangka kerja pemerintahan yang memperhatikan tentang kesetaraan dan keadilan gender pada isu kesenjangan sosial masyarakat melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Pemahaman Keadilan dan Kesetaraan Gender pada masyarakat Kabupaten Cirebon.

#### c. Ruang Lingkup

Kegiatan ini diawali dengan mengetahui Urusan Bidang, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta capaian kinerja, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, selanjutnya sebagai upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah maka perlu diselenggarakan :

1. Pertemuan POKJA PUG;
2. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek PPRG;
3. Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender terhadap Remaja/Siswa.

#### d. Batasan

Pelaksanaan Kegiatan PPRG dari Bulan Januari s.d Bulan Desember 2024

### 2. Hasil Pengawasan

#### a. Tahapan dalam melakukan pengawasan;

1. PPTK kegiatan melakukan persiapan kegiatan;
2. PPTK berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairan kegiatan;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran kepada pelaksana kegiatan;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan bukti pembayaran pada PPTK;
5. PPTK menugaskan staff untuk menyimpan bukti pembayaran sebagai bentuk SPJ kegiatan.

#### b. Sumber informasi

Dppkbp3a Kab. Cirebon

#### c. temuan pengawasan

Masih banyak perempuan dengan latar pendidikan dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah

**BAB III**  
**PENUTUP**

Perempuan merupakan tiang Negara, dengan demikian keberadaan perempuan sebagai bagian komponen pelaku perubahan menjadi hal yang penting. Namun demikian, perempuan masih dipandang sebelah mata, perempuan masih dianggap belum mampu menggerakkan kaumnya untuk bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan.

Oleh karena itu dengan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan menjadi mitra sejajar laki-laki dalam kiprahnya baik sebagai pengelola rumah tangga maupun dalam mengisi pembangunan.

Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak agar penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, adanya sinergi pembangunan secara menyeluruh antara berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan akademik), itulah harapan kami.

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hi. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



IKK Outcome No. 2.g.2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $\frac{67}{67} \times 100\%$
<b>Satuan Hasil</b>	:	100%
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.</li></ul>

<b>Data Pendukung</b>	<p>: ■ <b>Pembilang</b>  Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani ( a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak; b. Pelayanankesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota.  <b>Sumber Data</b> : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>■ <b>Penyebut</b>  Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang ada di kabupaten/kota.  <b>Sumber Data</b> : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
<b>Regulasi</b>	: ■ -

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN  
KEKERASAN YANG DITANGANI DAN DIDAMPINGI**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan Yang Diberikan
1.	DV24	P	15 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (16-01-24)</li><li>• Penjangkauan (16-01-2024)</li><li>• Terminasi (31-01-2024)</li></ul>
2.	MLN24	P	17 Tahun	Persetubuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (23-01-24)</li><li>• Psikolog (23-01-2024)</li><li>• Penjangkauan (23-01-2024)</li><li>• Visum (22-01-2024)</li><li>• Terminasi (29-04-2024)</li></ul>
3.	MY24	P	15 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (23-01-24)</li><li>• Psikolog (23-01-2024)</li><li>• Penjangkauan (23-01-2024)</li><li>• Visum (22-01-2024)</li><li>• Terminasi (30-04-2024)</li></ul>
4.	NYN24	P	16 Tahun	Persetubuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (31-01-24)</li><li>• Penjangkauan (31-01-2024)</li><li>• Kesehatan (05-02-2024)</li><li>• Terminasi (30-04-2024)</li></ul>
5.	BYA24	L	8 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak (Bullying)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (22-02-24)</li><li>• Penjangkauan (26-02-2024)</li><li>• Terminasi (29-02-2024)</li></ul>
6.	AHG24	L	4 Bulan	Hak Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (16-02-24)</li><li>• Penjangkauan (16-02-2024)</li><li>• Terminasi (23-02-2024)</li></ul>
7.	UH24	P	16 Tahun	TPPO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (27-02-24)</li><li>• Penjangkauan (29-02-2024)</li><li>• Penjangkauan ke 2 (08-03-2024)</li><li>• Terminasi (30-04-2024)</li></ul>
8.	NL24	L	13 Tahun	Penelantaran Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (15-03-24)</li><li>• Penjangkauan (18-03-2024)</li><li>• Terminasi (31-05-2024)</li></ul>
9.	VV24	P	4 Tahun	Perbuatan Cabul	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (19-03-24)</li><li>• Psikolog (22-03-2024)</li><li>• Penjangkauan (22-03-</li></ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>2024) • Psikolog (29-03-2024)</li> <li>• Visum (21-03-2024)</li> <li>• Penegakan Hukum (19-03-2024)</li> <li>• Rehabilitasi Sosial (26-03-2024)</li> <li>• Tokoh Agama (01-04-2024)</li> <li>• Terminasi (30-09-2024)</li> </ul>
10.	AL24	P	16 Tahun	Perbuatan Cabul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikolog Ke 1</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikolog Ke 2</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
11.	FRZ24	L	7 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak (Bullying)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
12.	MLD24	P	8 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak (Bullying)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
13.	MLK24	P	13 Tahun	KBGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
14.	SWN24	P	16 Tahun	KBGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
15.	MH24	L	6 Tahun	Hak Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
16.	AD24	L	13 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak (Bullying)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikolog Ke 1</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikolog Ke 2</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Trauma Healing</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
17.	STL24	P	16 Tahun	Eksplorasi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
18.	NFB24	P	7 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikologis Ke 1</li> <li>• Psikologis Ke 2</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Reintegrasi Sosial</li> <li>• Terminasi</li> </ul>

19.	KAP24	P	17 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Trauma Healing</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
20.	RPO24	P	13 Tahun	Perbuatan Cabul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Trauma Healing</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
21.	SDY24	L	16 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
22.	NAA24	P	12 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikolog Ke 1</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikolog Ke 2</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Shelter/ Rumah Aman</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
23.	NAF24	P	17 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
24.	ABA24	L	1 Tahun	Penelantaran Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
25.	AZR24	P	15 Tahun	Kekerasan terhadap Anak / Bullying	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
26.	NKA24	L	9 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
27.	PKCN24	P	3 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
28.	DFL24	P	16 Tahun	TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikolog Ke 1</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Psikolog Ke 2</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Shelter/ Rumah Aman</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
29.	SU24	P	17 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Mediasi</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
30.	FSH24	P	14 Tahun	Hak Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
31.	ANS24	P	13 Tahun	Kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
32.	AYM24	L	15 Tahun	Kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
33.	AZR24	P	13 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
34.	SFY24	P	4 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
35.	BQS24	P	9 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
36.	CWN24	P	14 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>

37.	ANG24	P	17 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
38.	NAK24	P	7 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
39.	APM24	P	12 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
40.	VRN24	L	11 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> </ul>
41.	MS24	L	11 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
42.	MHB24	L	10 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
43.	MIQ24	L	10 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
44.	AJ24	L	8 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
45.	AYW24	L	11 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
46.	AND24	L	15 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> </ul>
47.	NLA24	P	8 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Terminasi</li> </ul>

48.	ANK24	P	14 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
49.	AMM24	L	12 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
50.	FJR24	L	10 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
51.	VQU24	P	13 Tahun	Penelantaran Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
52.	SAA24	L	16 Tahun	Kekerasan terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Penjangkauan</li> </ul>
53.	KHO24	P	17 Tahun	KBGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Penjangkauan</li> </ul>
54.	RSK24	L	11 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
55.	RAJ24	L	12 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>
56.	NW24	P	9 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
57.	MSY24	P	7 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>
58.	RAY24	L	8 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
59.	RAH24	L	10 Tahun	Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>

60.	SJR24	P	10 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
61.	PAN24	P	13 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
62.	KNA24	P	11 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
63.	PAA24	P	13 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
64.	SJZ24	P	16 Tahun	Pencabulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Visum</li> </ul>
65.	RD24	L	15 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Trauma Healing</li> </ul>
66.	ER24	L	16 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Trauma Healing</li> </ul>
67.	ABA24	L	15 Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikologis</li> <li>• Trauma Healing</li> </ul>

Sumber : Bidang PPA pada Dinas PPKBP3A KAB. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**DATA KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENURUT BENTUK**  
**KEKERASAN SELAMA TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1.	DV24	P	15 Tahun	√	√					
2.	MLN24	P	17 Tahun		√	√				
3.	MY24	P	15 Tahun		√	√				
4.	NYN24	P	16 Tahun		√	√				
5.	BYA24	L	8 Tahun	√	√					
6.	AHG24	L	4 Bulan							√
7.	UH24	P	16 Tahun		√		√	√		
8.	NL24	L	13 Tahun		√				√	
9.	VV24	P	4 Tahun		√	√				
10.	AL24	P	16 Tahun		√	√				
11.	FRZ24	L	7 Tahun	√	√					
12.	MLD24	P	8 Tahun	√	√					
13.	MLK24	P	13 Tahun		√	√				
14.	SWN24	P	16 Tahun		√	√				
15.	MH24	L	6 Tahun		√					√
16.	AD24	L	13 Tahun	√	√					
17.	STL24	P	16 Tahun		√		√			
18.	NFB24	P	7 Tahun		√	√				
19.	KAP24	P	17 Tahun		√	√	√			
20.	RPO24	P	13 Tahun		√	√				
21.	SDY24	L	16 Tahun		√	√				
22.	NAA24	P	12 Tahun		√	√				

23.	NAF24	P	17 Tahun		√	√				
24.	ABA24	L	1 Tahun							√
25.	AZR24	P	15 Tahun	√	√					
26.	NKA24	L	9 Tahun	√	√					
27.	PKCN24	P	3 Tahun		√	√				
28.	DFL24	P	16 Tahun		√		√	√		
29.	SU24	P	17 Tahun		√	√				
30.	FSH24	P	14 Tahun		√					√
31.	ANS24	P	13 Tahun	√	√					
32.	AYM24	L	15 Tahun	√	√					
33.	AZR24	P	13 Tahun		√	√				
34.	SFY24	P	4 Tahun		√	√				
35.	BQS24	P	9 Tahun		√	√				
36.	CWN24	P	14 Tahun		√	√				
37.	ANG24	P	17 Tahun		√	√				
38.	NAK24	P	7 Tahun		√	√				
39.	APM24	P	12 Tahun		√	√				
40.	VRN24	L	11 Tahun		√	√				
41.	MS24	L	11 Tahun		√	√				
42.	MHB24	L	10 Tahun		√	√				
43.	MIQ24	L	10 Tahun		√	√				
44.	AJ24	L	8 Tahun		√	√				
45.	AYW24	L	11 Tahun		√	√				
46.	AND24	L	15 Tahun	√	√					
47.	NLA24	P	8 Tahun		√	√				
48.	ANK24	P	14 Tahun	√	√					
49.	AMM24	L	12 Tahun	√	√					
50.	FJR24	L	10 Tahun	√	√					
51.	VQU24	P	13 Tahun		√				√	
52.	SAA24	L	16 Tahun	√	√					

53.	KHO24	P	17 Tahun		√	√				
54.	RSK24	L	11 Tahun		√	√				
55.	RAJ24	L	12 Tahun	√	√					
56.	NW24	P	9 Tahun		√	√				
57.	MSY24	P	7 Tahun		√	√				
58.	RAY24	L	8 Tahun		√	√				
59.	RAH24	L	10 Tahun		√	√				
60.	SJR24	P	10 Tahun		√	√				
61.	PAN24	P	13 Tahun		√	√				
62.	KNA24	P	11 Tahun		√	√				
63.	PAA24	P	13 Tahun		√	√				
64.	SJZ24	P	16 Tahun		√	√				
65.	RD24	L	15 Tahun	√	√					
66.	ER24	L	16 Tahun	√	√					
67.	ABA24	L	15 Tahun	√	√					
<b>Jumlah</b>				<b>18</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : Bidang PPA pada Dinas PPKBP3A KAB. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**IKK Outcome No. 2.g.3**

**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

**Penjelasan IKK Outcome**

<b>Konsep/Definisi</b>	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $\frac{32}{886.998} \times 100.000$
<b>Satuan Hasil</b>	:	3,6077
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.</li></ul>

<p><b>Data Pendukung</b></p>	<p>: ▪ <b>Pembilang</b></p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi</p>
	<p>perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p><b>Sumber Data</b> : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>▪ <b>Penyebut</b></p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota.</p> <p><b>Sumber Data</b> : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
<p><b>Regulasi</b></p>	<p>: ▪ -</p>

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450  
**S U M B E R**

45611

**REKAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN BIDANG**  
**PPA DINAS PPKBP3A KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN 2024**

No	Nama	Umur	Jenis Kasus	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1.	SV24	21 Tahun	Perbuatan Cabul	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (23-01-24)</li><li>• Psikolog (2-2-2024)</li><li>• Terminasi (9-02-2024)</li></ul>	• Psikolog (2-2-2024)	Terminasi
2.	ANA24	21 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan (19-02-24)</li><li>• Pengelolaan kasus (22-02-2024)</li><li>• Terminasi (22-02-2024)</li></ul>		Terminasi
3.	RN24	37 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Psikologis</li><li>• Terminasi</li></ul>	• Psikolog	Terminasi
4.	DY24	31 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Penjangkauan</li><li>• Rohaniawan</li><li>• Rehabilitasi Sosial</li><li>• Reintegrasi Sosial</li><li>• Terminasi</li></ul>		Terminasi
5.	FSP24	35 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Pengelolaan Kasus</li><li>• Terminasi</li></ul>		Terminasi
6.	ES24	38 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Penjangkauan Korban</li><li>• Pengelolaan Kasus</li><li>• Terminasi</li></ul>		Terminasi
7.	IRN24	46 Tahun	Eksplorasi	Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Pengelolaan Kasus</li><li>• Terminasi</li></ul>		Terminasi
8.	IYA24	21 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan</li><li>• Pengelolaan Kasus</li></ul>		Terminasi

					• Terminasi		
9.	LL24	36 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog (ibu dan anak)	Terminasi
10.	SNT24	33 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi
11.	LSN24	44 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Psikologis ke 1</li> <li>• Psikologis ke 2</li> <li>• Penjangkauan</li> <li>• Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikologis ke 1</li> <li>• Psikologis ke 2</li> </ul>	Terminasi
12.	AYH24	21 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Psikolog</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi
13.	FAR24	18 Tahun	Pencabulan	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi
14.	JHN24	22 Tahun	TPPO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi
15.	FTY24	23 Tahun	TPPO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> <li>• Terminasi</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi
16.	NAU24	18 Tahun	Persetubuhan	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>	• Psikolog	Terminasi

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikolog</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		
17.	WPR24	25 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
18.	WND24	33 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> </ul>		Proses
19.	NRL24	26 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
20.	AWI24	24 Tahun	KDRT	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
21.	JLH24	32 Tahun	Persetubuhan	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
22.	NIA24	23 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
23.	TTN24	40 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> </ul>	• Psikolog	Proses
24.	DR24	31 Tahun	Kekerasan terhadap Perempuan	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> <li>• Medis</li> </ul>	• Psikolog	Proses
25.	CSR24	43 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
26.	PPWT24	29 Tahun	KBGO	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi
27.	MS24	34 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Terminasi</li> </ul>		Terminasi

28.	NDL24	19 Tahun	Pencabulan	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Penjangkauan Korban</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> <li>• Penegakan Hukum</li> <li>• Psikolog</li> </ul>	• Psikolog	Proses
29.	SNH24	42 Tahun	KBGO	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> </ul>	-	Proses
30.	VOI24	40 Tahun	KDRT	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> </ul>	-	Proses
31.	FM24	40 Tahun	Kekerasan Verbal	Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> </ul>	-	Proses
32.	KTN24	18 Tahun	Pencabulan	Belum Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pengelolaan Kasus</li> </ul>	-	Proses

Sumber : Bidang PPA pada Dinas PPKBP3A KAB. Cirebon

Sumber, 02 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264  
Website : [Disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://Disdukcapil.cirebonkab.go.id) email : [disdukcapil.cirebonkab.go.id](mailto:disdukcapil.cirebonkab.go.id)  
SUMBER-45611

**JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN USIA DIATAS 18 TAHUN DAN/ATAU SUDAH MENIKAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN USIA DIATAS 18 TAHUN DAN/ATAU SUDAH MENIKAH		
		L	P	JML
1	WALED	22.761	22.238	44.999
2	CLEDUG	18.371	18.100	36.471
3	LOSARI	24.970	24.705	49.675
4	PABEDILAN	23.802	23.948	47.750
5	BABAKAN	28.457	28.775	57.232
6	KARANGSEMBUNG	14.197	14.330	28.527
7	LEMAHABANG	22.000	21.795	43.795
8	SUSUKAN LEBAK	16.145	15.766	31.911
9	SEDONG	17.152	16.722	33.874
10	ASTANAJAPURA	31.552	30.059	61.611
11	PANGENAN	18.642	18.198	36.840
12	MUNDU	30.752	29.645	60.397
13	BEBER	17.682	16.522	34.204
14	TALUN	27.205	26.557	53.762
15	SUMBER	37.424	36.526	73.950
16	DUKUPUNTANG	26.421	26.036	52.457
17	PALIMANAN	24.054	24.079	48.133
18	PLUMBON	32.404	31.849	64.253
19	WERU	28.257	26.869	55.126
20	KEDAWUNG	23.456	23.621	47.077
21	GUNUNG JATI	31.573	32.086	63.659
22	KAPETAKAN	24.329	23.956	48.285
23	KLANGENAN	20.958	20.678	41.636
24	ARJAWINANGUN	27.609	27.366	54.975
25	PANGURAGAN	17.439	17.368	34.807
26	CIWARINGIN	15.446	15.731	31.177
27	SUSUKAN	28.795	28.206	56.501
28	GEGESIK	28.546	28.400	56.946
29	KALIWEDI	16.398	16.368	32.766
30	GEBANG	27.087	26.918	54.005
31	DEPOK	25.921	25.431	51.352
32	PASALEMAN	10.932	10.929	21.861
33	PABUARAN	14.731	14.546	29.277
34	KARANGWARENG	11.264	11.083	22.347
35	TENGAH TANI	17.664	17.058	34.722
36	PLERED	21.898	21.253	43.151
37	GEMPOL	18.296	18.051	36.347
38	GREGED	22.842	21.533	44.375
39	SURANENGGALA	18.256	18.390	36.646
40	JAMBLANG	15.359	15.307	30.666
	<b>JUMLAH</b>	<b>900.547</b>	<b>886.998</b>	<b>1.787.545</b>

Sumber, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

**H. IMAN SUPRIADI, S.Sos.M.Si**  
Pemuda Utama Muda  
C I N E B, 29670208 199403 1 013